



RENCANA STRATEGIS

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 2025-2029



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metode Perencanaan Strategis	2
1.3 Sejarah Pendidikan Politeknik Negeri Semarang.....	2
1.4 Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan di Polines	5
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan	6
1.5.1 Maksud Penyusunan	6
1.5.2 Tujuan Penyusunan.....	6
1.6 Capaian Indikator Kinerja 2020-2024	6
1.7 Asas, Tata Nilai, dan Budaya Kerja Polines.....	12
1.8 Kondisi Umum	16
1.8.1 Tata Kelola dan Kerjasama	16
1.8.2 Mahasiswa.....	17
1.8.3 Sumber Daya Manusia.....	18
1.8.4 Keuangan, Sarana dan Prasarana	19
1.8.5 Kurikulum.....	21
1.8.6 Penelitian.....	22
1.8.7 Pengabdian kepada Masyarakat	24
1.8.8 Luaran Tridharma.....	27
1.9 Potensi dan Permasalahan.....	28
1.9.1 Potensi	28
1.9.2 Masalah.....	32
1.10 Isu Strategis	34
1.11 Pemosisian Strategis Polines	34
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	38
2.1 Visi Polines.....	38
2.2 Misi Polines	39
2.3 Tujuan Polines	39
2.4 Sasaran Strategis Polines.....	40
2.5 Indikator Kinerja Utama Polines	40
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	43
3.1 Arah Kebijakan.....	43

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	43
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Semarang	50
3.2 Kerangka Regulasi.....	55
3.3 Kerangka Kelembagaan, Tugas dan Fungsi Polines.....	55
3.3.1 Tugas Polines.....	55
3.3.2 Fungsi Organisasi Polines	56
3.4 Reformasi Birokrasi	58
3.4.1 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi Polines	60
3.4.2 Target Kinerja Reformasi Birokrasi	61
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	65
4.1 Target Sasaran Strategis.....	65
4.2 Kerangka Pendanaan.....	71
BAB V PENUTUP	73
5.1 Pedoman Transisi	73
5.2 Kaidah Pelaksanaan	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Polines 2020-2023	7
Tabel 1.2. Jumlah SDM Polines	18
Tabel 1.3. Topik dan Sub-Topik Penelitian	23
Tabel 1.4. Capaian Penelitian	24
Tabel 1.5. Jumlah Judul PkM Tahun 2020-2022	25
Tabel 1.6. Skor IFAS.....	34
Tabel 1.7. Skor EFAS	35
Tabel 1.8. Strategic Factor Analysis Summary (SFAS).....	36
Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Polines ...	41
Tabel 3.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Polines.....	51
Tabel 3.2. Penjelasan tugas dan fungsi dari organ Polines	56
Tabel 3.3. Prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi	61
Tabel 3.4. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Polines 2025-2029	61
Tabel 3.5. Target pembangunan Reformasi Birokrasi Polines	62
Tabel 4.1. Tabel Sasaran Strategis Polines	65
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Politeknik Negeri Semarang	67
Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Ilustrasi Gambar Asas, Budaya kerja dan Tata Nilai Polines	14
Gambar 1.2. <i>Roadmap</i> Pengembangan Jangka Panjang Polines	15
Gambar 1.3. Ilustrasi Rencana Jangka Panjang pendidikan tinggi di Polines	16
Gambar 1.4. Pendaftar dan mahasiswa Aktif Polines	17
Gambar 1.5. <i>Roadmap</i> Penelitian.....	22
Gambar 1.6. <i>Roadmap</i> Pengabdian kepada Masyarakat	25
Gambar 1.7. Topik PkM.....	27
Gambar 1.8. Pemosisian Polines	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Semarang (Polines) sebagai salah satu institusi Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berdaya saing. Sejalan dengan visi pembangunan Indonesia yang berfokus pada penguatan kualitas SDM, Polines memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan global, mendukung industrialisasi, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada era Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan teknologi digital yang pesat, dunia industri mengalami transformasi besar-besaran. Oleh karena itu Polines dituntut untuk melakukan transformasi Pendidikan Tinggi Vokasi sehingga Polines bisa beradaptasi dengan cepat, meningkatkan relevansi kurikulum, dan menjalin kemitraan yang lebih erat dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal ini menjadi sangat penting guna menciptakan ekosistem pendidikan yang *link and match* dengan kebutuhan industri, serta memastikan lulusan Polines memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikan PTV yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Rencana Strategis (Renstra) Polines 2025-2029 ini disusun sebagai panduan arah kebijakan dan strategi Polines untuk lima tahun ke depan. Renstra ini bertujuan untuk memastikan bahwa Polines tetap berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui kontribusi dalam pengembangan SDM unggul yang memiliki kompetensi di bidang teknik, bisnis, dan industri. Selain itu, Polines juga diharapkan mampu berperan dalam mendorong inovasi di berbagai sektor, memperkuat penelitian terapan, serta memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi masyarakat dan industri. Hal ini sesuai dengan cita-cita Polines yaitu sebagai pusat inovasi teknologi dan bisnis yang terintegrasi yang memiliki kontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan daya saing bangsa

Dalam mendukung pembangunan nasional, Polines tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga pada pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Melalui penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, Polines berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi dan solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam dunia industri dan masyarakat luas.

Renstra Polines 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan tantangan eksternal, termasuk perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi global, serta kebutuhan industri yang terus berkembang.

Evaluasi terhadap pencapaian Renstra Polines periode sebelumnya (Renstra 2020-2024) juga menjadi dasar dalam perumusan Renstra 2025-2029 yang lebih baik sesuai dengan semboyan Polines 'Committed to Quality'.

Perencanaan yang tertuang dalam Renstra Polines 2025-2029 telah sesuai dan mendukung keberhasilan Visi Kemendikbud 2025-2029 yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

1.2 Metode Perencanaan Strategis

Renstra Polines Tahun 2025-2029 ini disusun dengan metode partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder Polines. Perencanaan diawali dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) Polines. Hasil analisis SWOT digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra, yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan pencapaiannya. Strategi implementasi Renstra Polines 2025-2029 dijalankan melalui penyusunan program, kegiatan, anggaran, dan kerangka implementasi (sinkronisasi koordinasi, dan tata kelola; distribusi urusan berdasar kegiatan; sistem pengawasan internal; dan mekanisme dan instrumen pemantauan/evaluasi).

Hasil capaian Renstra dievaluasi secara periodik untuk mengetahui kemajuannya. Keberhasilan program dapat diketahui berdasarkan pemenuhan target yang ditetapkan pada Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja (IK). Dalam penetapan Indikator Kinerja, Renstra Perjanjian Kerja (PK) Direktur dengan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi serta kontrak kerja direktur dengan kementerian keuangan.

1.3 Sejarah Pendidikan Politeknik Negeri Semarang

Untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional, terutama berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja bidang teknik berketerampilan tinggi dan siap pakai, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1982 tanggal 09 Februari 1982, pemerintah Indonesia mendirikan enam politeknik negeri perintis, yaitu Politeknik Undip, Politeknik Universitas Sriwijaya, Politeknik Universitas Indonesia, Politeknik Institut Teknologi Bandung, Politeknik Universitas Sumatera Utara, dan Politeknik Universitas Brawijaya. Saat awal berdiri, keenam politeknik tersebut masih bergabung dengan perguruan tinggi induknya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan politeknik sangatlah penting dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Pada masa itu, politeknik merupakan lembaga pendidikan tinggi jenjang Diploma 3 yang berfokus pada pengembangan penguasaan keahlian dan ketrampilan pada bidang-bidang teknik tertentu, utamanya teknik mesin, teknik elektro dan teknik sipil. Ahli Madya merupakan gelar jenjang lulusan pendidikan politeknik. Posisinya di dalam hirarki manajemen adalah pada tingkat manajemen menengah (*middle management*) yang berfungsi menjembatani kesenjangan manajerial dalam pengelolaan organisasi antara manajemen tingkat atas (*top management*) yang diisi oleh para sarjana lulusan universitas/institut dan manajemen tingkat bawah (*low management*) yang diisi oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dalam perkembangannya Politeknik Undip pada tahun 1985 membuka Departemen Tata Niaga dan mengembangkan Departemen Teknik Elektro menjadi Departemen Teknik Listrik dan Departemen Teknik Elektronika/Telekomunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 313/O/1991 tanggal 6 Juni 1991 Tentang Penataan Politeknik dalam lingkungan Universitas dan Institut Negeri, pada tahun 1992 di Politeknik Undip dilakukan penataan jurusan dan Program Studi sebagai berikut.

1. Jurusan Teknik Sipil, dengan Program Studi D3 Konstruksi Gedung dan D3 Konstruksi Sipil;
2. Jurusan Teknik Mesin, dengan Program Studi D3 Teknik Mesin dan D3 Teknik Konversi Energi;
3. Jurusan Teknik Elektro, dengan Program Studi D3 Teknik Listrik, D3 Teknik Elektronika, dan D3 Teknik Telekomunikasi;
4. Jurusan Akuntansi, dengan Program Studi D3 Akuntansi dan D3 Keuangan dan Perbankan; serta
5. Jurusan Administrasi Niaga, dengan Program Studi D3 Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran yang berubah menjadi D3 Administrasi Bisnis.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kepmendikbud) Nomor 175/O/1997 tanggal 6 Agustus 1997, Politeknik Universitas Diponegoro dinyatakan sebagai Satuan Kerja (Satker) Mandiri dengan nama Politeknik Negeri Semarang (Polines). Statuta Polines ditetapkan dengan Kepmendikbud Nomor 311/O/1998 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 7 Tahun 2008 dan terakhir saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 45 Tahun 2016.

Dengan demikian, Polines menjadi lembaga yang mandiri dan terpisah dari Undip yang sebelumnya telah menjadi perguruan tinggi induknya. Status ini membawa konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut.

1. Nama lembaga yang digunakan adalah Politeknik Negeri Semarang dengan akronim Polines;
2. Polines mempunyai wewenang untuk mengelola seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikannya secara mandiri dan terpisah dari Undip;
3. Adanya tanggung jawab, kesempatan yang lebih luas dan berharga bagi seluruh Sivitas Akademika dan segenap Tenaga Kependidikan Polines untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memonitor, menjamin, dan mengevaluasi program-program dan kegiatan-kegiatannya sendiri secara lebih leluasa, kreatif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Polines;
4. Hubungan kelembagaan, pembinaan, konsultasi, dan berbagai urusan lain dengan departemen-departemen terkait di tingkat pusat dan lembaga-lembaga lain dilakukan secara langsung dan mandiri; dan
5. Seluruh aset yang semula atas nama Politeknik Undip dialihkan atas nama Polines.

Penambahan Program Studi Diploma 3 juga masih dilakukan dengan berdirinya Program Studi Manajemen Pemasaran/Marketing (D3) pada Polines sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1581/D/T/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 dan

Program Studi Teknik Informatika dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2013/D/T/2004 tertanggal 10 Juni 2004. Sampai pada tahun 2020, jumlah Program Studi Diploma 3 adalah sebanyak 12 Program Studi yang terdiri dari:

1. Program Studi D3 Konstruksi Gedung;
2. Program Studi D3 Konstruksi Sipil;
3. Program Studi D3 Teknik Mesin;
4. Program Studi D3 Konversi Energi;
5. Program Studi D3 Teknik Listrik;
6. Program Studi D3 Teknik Elektronika;
7. Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi;
8. Program Studi D3 Teknik Informatika;
9. Program Studi D3 Akuntansi;
10. Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan;
11. Program Studi D3 Administrasi Bisnis;
12. Program Studi D3 Manajemen Pemasaran.

Saat ini Polines bukan lagi hanya sebagai penyelenggara program Diploma 3 saja, namun juga telah berkembang menjadi penyelenggara program vokasi dengan jenjang yang lebih tinggi, yaitu Sarjana Terapan dan Magister Terapan. Tiga belas Program Studi Sarjana Terapan yang sudah diselenggarakan di Polines adalah:

1. Program Studi Perbankan Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3413/D/T/2006 tanggal 8 September 2006;
2. Program Studi Teknik Telekomunikasi sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3413/D/T/2006 tanggal 8 September 2006;
3. Program Studi Komputerisasi Akuntansi sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4898/D/T/2006 tertanggal 21 Desember 2006;
4. Program Studi Perawatan dan Perbaikan Gedung sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4683/D/T/2008 tanggal 31 Desember 2008;
5. Program Studi Manajemen Bisnis Internasional sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 205/D/O/2010 tanggal 9 Desember 2010;
6. Program Studi Perancangan Jalan dan Jembatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 300/E/O/2011 tanggal 21 Desember 2011;
7. Program Studi Analisis Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 167/E/O/2012 tanggal 14 Mei 2012;
8. Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 135/E/O/2013 tanggal 18 April 2013;
9. Program Studi Akuntansi Manajerial sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/E/O/2013 tanggal 5 September 2013;
10. Program Studi Administrasi Bisnis Terapan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 450/E/O/2013 tanggal 27 September 2013;

11. Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Ristek Dikti Nomor 450/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
12. Program Studi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik sesuai dengan Surat Izin Pembukaan Program Studi Nomor 178/M/2020 tanggal 31 Januari 2020; dan
13. Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer sesuai dengan Surat Izin Pembukaan Program Studi Nomor 530/M/2020 tanggal 15 Mei 2020.

Polines juga memiliki Program Magister Terapan Program Studi Teknik Telekomunikasi yang berada di Jurusan Elektro. Keberadaan Program Studi ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 345/KPT/I/2016 tanggal 13 September 2016. Dengan demikian, pada tahun 2020, Polines memiliki 25 Program Studi.

1.4 Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan di Polines

Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di Polines adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Instrument For The Amandment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997)
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
6. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 313/O/1991 Tanggal 6 Juni 1991 tentang Penataan Politeknik dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri;
13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kepmendikbud) Nomor 175/O/1997 Tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang (Polines);
14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/DJ/KEP/1979 tentang Pembentukan Politeknik di 6 (enam) Daerah yang Mempunyai Perguruan Tinggi Negeri.

16. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 45 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan

1.5.1 Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Polines 2020-2024 adalah sebagai:

1. Pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Polines yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
2. Salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah; dan
3. Pedoman perencanaan operasional untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.5.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Polines 2020-2024 adalah untuk:

1. mengatur distribusi sumber daya terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran lembaga;
2. mengukur dan mengevaluasi kinerja dari hasil-hasil yang dicapai dan membandingkan antara tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan yang direalisasikan; dan
3. mengendalikan kesinambungan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Polines dari satu periode ke periode berikutnya demi tercapainya visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.6 Capaian Indikator Kinerja 2020-2024

Polines telah melaksanakan amanah Renstra dalam rentang tahun 2020-2024 untuk mewujudkan program dan kegiatan dalam mencapai Keunggulan Inovasi Terapan dan Teknologi berbasis Industri. Untuk memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Polines telah dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra terhadap realisasi capaian kinerja serta menghitung tingkat ketercapaiannya. Dengan diketahuinya capaian kinerja, dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan permasalahan/hambatan/ ketidakberhasilannya.

Capaian program dan kegiatan 2020-2024 yaitu mendukung terwujudnya Keunggulan Inovasi Terapan dan Teknologi berbasis Industri dengan unsur-unsur Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel dan Layanan Prima yang terdiri dari meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, dan meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran capaian kinerja sampai tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Polines 2020-2023

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Proyeksi Capaian *
[1.1.1]	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	79,79	55	47,71	80	34,3	80	69,6	80%	80%
[1.1.2]	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	15,76	10	7,78	15	8,56	30	8,35	30%	30%

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Proyeksi Capaian *
[1.1.3]	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	15	21,58	15	22,65	20	21,31	30	38,81	39%	39%
[1.1.4]	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	30	51,37	30	57,46	40	59,66	60	80,17	81%	81%

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Proyeksi Capaian *
[1.1.5]	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Luaran per Jumlah Dosen	0,1	0,29	0,1	0,34	0,15	0,24	100	32	100	100
[1.1.6]	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	76,92	35	84,62	50	62,96	100	100	100	100
[1.1.7]	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project)	%	35	31,2	35	31,2	50	66,73	50	70,43	71%	71%

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*		
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Proyeksi Capaian *	
	sebagai sebagian bobot evaluasi.											
[1.1.8]	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2,5	0	2,5	0	5	0	5	3,7	5%	3,85%
[1.1.9]	Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	%	BB [70]	A [80,47]	BB [70]	A [81,46]	A [80]	A [82,40]	A	A [89,25]	A	A
[1.2.1]	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Satker Minimal 93	%	93	94,36	93,5	90,13	93,5	93,8	94	89,28	90	A
1	Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional	%			45	49,42	54	51,48	54	58,6	63%	63%

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024*	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Proyeksi Capaian *
2	Realisasi pendapatan BLU Tahun 2022	Rp			34.850.296.905	30.232.472.568	41.000.000.000	61.383.609.377	69.000.000.000	75.341.896.031	71.000.000.000	72.713.001.278
3	Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset	Rp			864.126.750	944.982.325	1.350.000.000	1.582.826.667	1.700.000.000	2.166.637.680	3.000.000.000	3.997.777.137
4	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	%			70	106	106	130,23	110	111,18	110%	100%

Strategi pengembangan POLINES dari tahun 2020 hingga 2024 dievaluasi berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan yang konsisten dalam beberapa aspek, seperti persentase dosen yang beraktivitas di kampus lain atau terlibat dalam program QS100, jumlah dosen dengan kualifikasi S3, dan program studi yang menjalin kerja sama dengan mitra industri atau institusi eksternal. Selain itu, jumlah dan kualitas penelitian juga menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan bertambahnya hibah matching fund dan competitive fund.

1.7 Asas, Tata Nilai, dan Budaya Kerja Polines

Politeknik Negeri Semarang (Polines) sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Asas, tata nilai, dan budaya kerja yang diterapkan di Polines menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan akademik dan non-akademik, serta dalam membentuk lulusan yang tidak hanya unggul dalam keterampilan teknis, tetapi juga memiliki karakter dan etika yang baik.

1. Asas Polines sebagai Pendidikan Tinggi Vokasi

Asas merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman Polines dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Asas Polines sebagai Pendidikan Tinggi Vokasi adalah :

Pendidikan Berbasis Kompetensi (Competency-Based Education): Asas utama dalam pendidikan vokasi di Polines adalah pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pendidikan di Polines menekankan penguasaan keterampilan teknis, praktik langsung, serta penerapan ilmu pengetahuan di dunia kerja.

Link and Match dengan Industri: Polines menganut asas keterkaitan yang erat antara dunia pendidikan dan dunia industri. Kurikulum, metode pembelajaran, dan program magang disusun berdasarkan masukan dari industri, sehingga lulusan Polines memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Inovasi dan Adaptasi Teknologi: Asas ini berfokus pada pengembangan kurikulum dan program yang selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini, baik di bidang teknik, bisnis, maupun teknologi digital. Polines berusaha menciptakan lulusan yang inovatif dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di dunia industri.

Pengabdian kepada Masyarakat: Sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi, Polines menganut asas pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian terapan dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, terutama di bidang teknologi dan bisnis.

2. Tata Nilai Polines

Tata nilai adalah seperangkat keyakinan dan standar yang dijunjung tinggi oleh Polines. Nilai-nilai ini membantu membentuk sikap dan perilaku individu di lingkungan kampus, menciptakan atmosfer yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Tata nilai di Polines adalah :

Profesionalisme: Polines menjunjung tinggi sikap profesional dalam setiap aktivitasnya. Seluruh civitas akademika diharapkan untuk bekerja dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap mutu, baik dalam proses pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Integritas: Integritas menjadi landasan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Polines. Kejujuran, transparansi, dan etika menjadi pilar dalam menjalankan tugas sehari-hari dan dalam hubungan dengan industri serta masyarakat.

Kerja Sama (Teamwork): Polines mempromosikan tata nilai kerja sama yang erat baik di antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun dengan mitra industri. Kolaborasi ini penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Keunggulan (Excellence): Tata nilai keunggulan Polines menekankan pada upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan layanan lainnya.

Polines berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peduli dan Empati: Polines mendorong seluruh anggotanya untuk mengembangkan sikap peduli terhadap sesama, baik dalam lingkungan kampus maupun dalam masyarakat luas. Sikap empati dan solidaritas sosial menjadi bagian penting dari nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan.

3. Budaya Kerja di Polines

Budaya kerja adalah pola perilaku, nilai, dan norma yang diadopsi oleh seluruh sivitas akademika Polines. Budaya kerja ini juga mendorong sinergi antara staf, dosen, dan mahasiswa untuk mencapai tujuan bersama. Budaya kerja di Polines adalah :

Kedisiplinan dan Tanggung Jawab: Budaya kerja di Polines sangat menekankan pentingnya kedisiplinan baik bagi dosen, mahasiswa, maupun staf. Seluruh civitas akademika Polines memegang prinsip 3T: Tepat Waktu, Tepat Ukuran, dan Tepat Aturan. Setiap anggota civitas akademika diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengikuti aturan yang berlaku, dan menjaga komitmen terhadap pekerjaan.

Inovasi dan Kreativitas: Sebagai institusi vokasi, Polines menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam proses belajar mengajar dan penelitian. Dosen dan mahasiswa didorong untuk selalu menemukan solusi kreatif dan inovatif yang dapat diterapkan di dunia industri dan masyarakat.

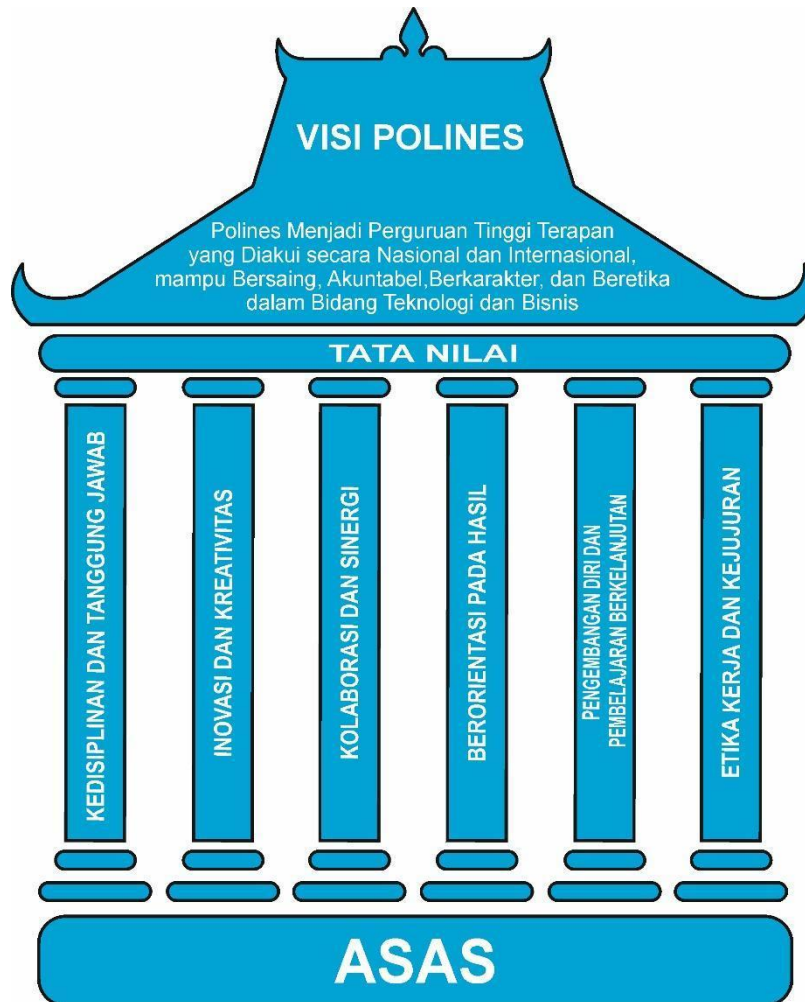
Kolaborasi dan Sinergi: Budaya kerja kolaboratif yang kuat di Polines diwujudkan melalui sinergi antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan dunia industri. Lingkungan yang kolaboratif ini menciptakan peluang untuk saling belajar dan menghasilkan karya yang bermanfaat.

Berorientasi pada Hasil (Outcome-Oriented): Polines memfokuskan pada budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Setiap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ditargetkan untuk menghasilkan lulusan, inovasi, atau solusi yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat.

Pengembangan Diri dan Pembelajaran Berkelanjutan: Budaya pengembangan diri di Polines mendorong seluruh sivitas akademika untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan baru, dan meningkatkan pengetahuan mereka sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Etika Kerja dan Kejujuran: Etika kerja yang baik dan kejujuran adalah fondasi utama dalam budaya kerja di Polines. Setiap anggota diharapkan untuk menjaga integritas pribadi dan organisasi dalam setiap tindakan yang diambil.

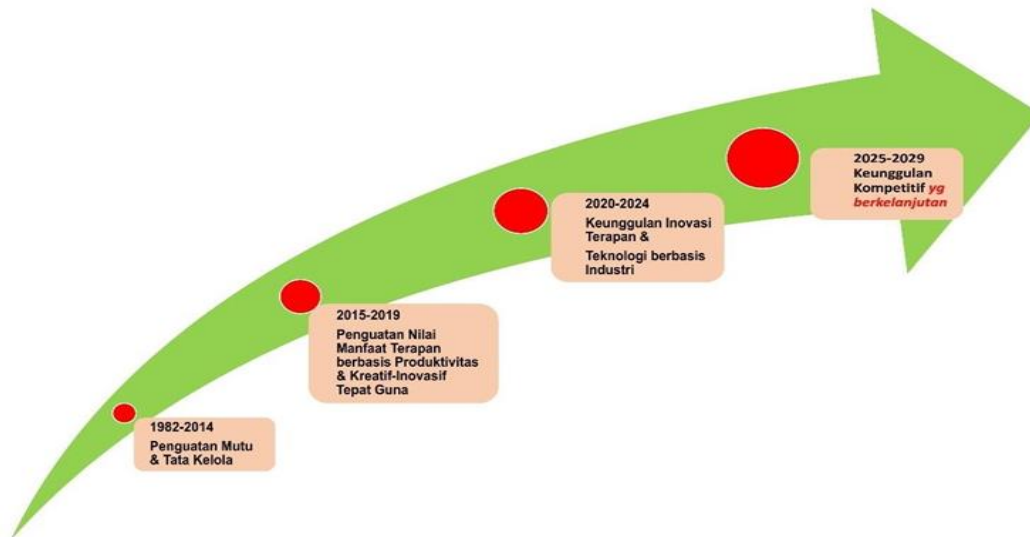
Melalui penerapan asas, tata nilai, dan budaya kerja dan dengan ditambahkan semboyan Polines sebagai Badan Layanan Umum yaitu BLU SPEED (Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, dan Digital) maka Polines berkomitmen untuk terus memberikan kualitas layanan pendidikan terbaik. Polines siap mencetak lulusan yang siap berkontribusi dalam pembangunan nasional, berdaya saing global, dan mampu bersaing dalam dunia kerja yang terus berubah.



Gambar 1.0-1. Ilustrasi Gambar Asas, Budaya kerja dan Tata Nilai Polines

Gambar 1.1. mengilustrasikan ASAS menjadi **dasar yang menjadi pijakan** Polines dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membentuk lulusan yang tidak hanya unggul dalam keterampilan teknis, tetapi juga memiliki karakter dan etika yang baik. Kemudian Budaya Kerja Polines menjadi **pola perilaku, nilai, dan norma yang diterapkan dan melekat** pada oleh seluruh sivitas akademika Polines. Asas dan budaya kerja menjadi penopang terciptanya Tata Nilai Polines yakni **keyakinan dan standar berupa Nilai-nilai pembentuk sikap dan perilaku individu** di lingkungan kampus, menciptakan atmosfer yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan diri yang dijunjung tinggi oleh civitas akademika untuk mencapai Visi Polines sebagai target pencapaian pengembangan pendidikan tinggi di Polines.

Pencapaian pengembangan pendidikan tinggi di Polines akan dicapai dengan arah pengembangan yang terlihat pada roadmap pengembangan Polines. Arah dan tahapan pengembangan Polines dilandasi atas dasar mandat Polines serta capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan iptek. Kurun dan tema Pengembangan Polines sampai dengan tahun 2029 dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 1.2. Tema strategis pengembangan dikelompokkan dalam kurun waktu dan tema sebagai berikut:



Gambar 1.0-2. Roadmap Pengembangan Jangka Panjang Polines

1. 1982–2014 Penguatan Mutu dan Tata Kelola yang Baik
2. 2015–2019 Penguatan nilai Manfaat Terapan Berbasis Produktivitas dan Kreatif- inovatif Tepat Guna.
3. 2020–2024 Keunggulan Inovasi Terapan dan *Technology-based Industry*.
4. 2025–2029 Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan

Polines (Politeknik Negeri Semarang) adalah salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang berfokus pada pendidikan vokasi dengan pencapaian Keunggulan Kompetitif yang berkelanjutan pada tahun 2029. Dalam konteks **keunggulan kompetitif berkelanjutan**, Polines dapat diartikan sebagai salah satu lembaga yang berusaha menjaga relevansi dan daya saingnya di dunia pendidikan tinggi dan industri melalui berbagai strategi. Keunggulan kompetitif berkelanjutan sendiri merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau institusi untuk mempertahankan posisi unggul dalam persaingan secara jangka panjang. Untuk Polines, ini bisa berarti:

1. **Kurikulum yang adaptif**: Polines terus menyesuaikan program pendidikannya agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang berubah dengan cepat, sehingga lulusannya memiliki keahlian yang relevan.
2. **Kolaborasi dengan industri**: Untuk menjaga keunggulan kompetitif, Polines perlu bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan sektor industri, menyediakan program magang, penelitian terapan, atau kerjasama dalam pengembangan kurikulum.
3. **Penguatan riset dan inovasi**: Polines perlu mengembangkan kemampuan riset dan inovasi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang dihadapi industri, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi dan daya saing mereka.
4. **Pengembangan sumber daya manusia**: Menjaga keunggulan juga berarti terus mengembangkan kompetensi dosen dan staf dalam bidang teknologi terbaru dan metodologi pengajaran.

Dengan fokus pada aspek-aspek ini, Polines dapat terus bersaing dalam menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu politeknik unggul di Indonesia. Pencapaian keempat aspek tersebut dikontrol dan diawasi dengan sistem pengawasan dan penjaminan mutu yang memadai. Keempat aspek dan pengawasan serta penjaminan mutu Polines ini, tidak

akan terlaksana dan tercapai dengan baik tanpa ada dukungan dari Sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan yang memadai, serta tata kelola yang baik.

Pada Gambar 1.3., menunjukkan Rencana Jangka Panjang pengembangan pendidikan tinggi di Polines yang diilustrasikan dalam Bangunan Sebuah Rumah yang terdiri dari 4 komponen (struktur) yaitu Fondasi, Pilar, Pengikat, dan Atap. Masing-masing komponen bersifat Dinamis sesuai dengan tuntutan pemangku kepentingan dan perkembangan iptek. Bangunan dapat berdiri tegak dan kokoh harus ditopang komponen Fondasi dan Pilar yang kuat. SDM, Pendanaan, sistem tata kelola menjadi Fondasinya karena menopang pilar untuk berdiri tegak, pengikat untuk tetap kuat serta atap untuk tidak runtuh. tridharma perguruan tinggi ditambah dengan kerjasama dudi menjadi Pilarnya karena Polines merupakan lembaga pendidikan Vokasi dalam pemenuhan kewajiban TriDharma dan tidak lepas dari kerjasama untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Visi Polines menjadi Pengikat yang memastikan fondasi, pilar dalam satu tujuan dan tidak runtuh.



Gambar 1.0-3 Ilustrasi Rencana Jangka Panjang pendidikan tinggi di Polines

1.8 Kondisi Umum

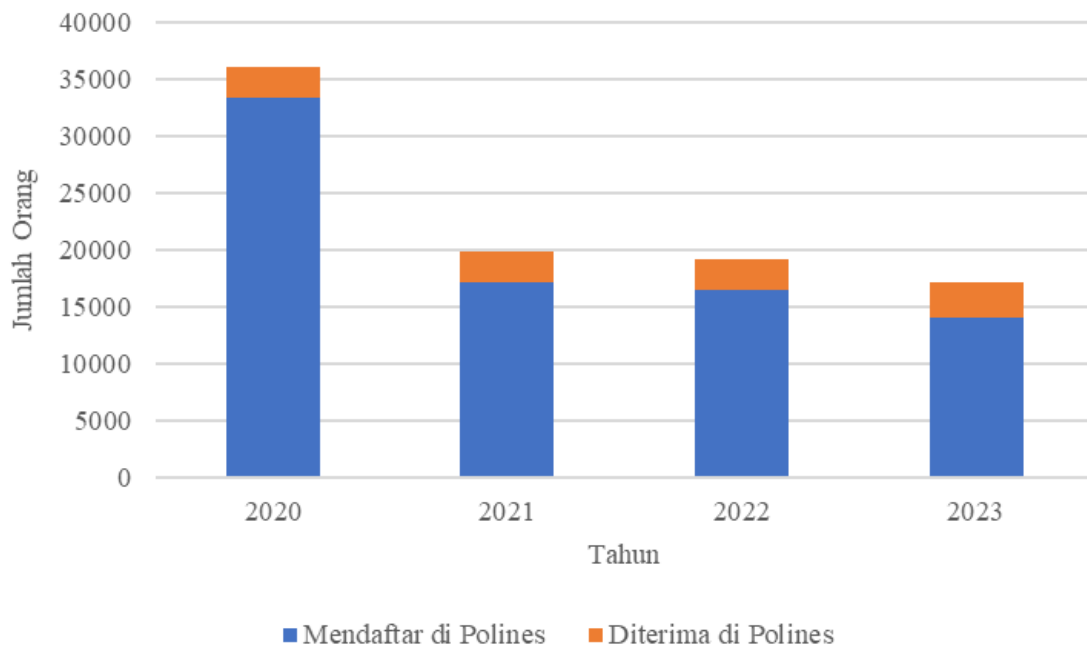
1.8.1 Tata Kelola dan Kerjasama

Struktur Organisasi Polines secara detail diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 260/O/2024 tentang Perincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang. Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Kerja Sama, Hubungan, Masyarakat, dan Sistem Informasi., Bagian, Jurusan, Pusat, Satuan Pengawasan Internal, Dewan Pengawas, dan Unit Penunjang Akademik. Tata Kelola Polines memperoleh nilai A sejak tahun 2020, karena adanya peningkatan pengelolaan di lingkup Polines dengan adanya pengalihan status Polines dari Satker menjadi PTN BLU. Statuta Polines memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Polines memiliki 27 Program studi pada tahun 2024, jumlah prodi yang memiliki kerjasama adalah sebesar 20 pada tahun 2020, 22 pada tahun 2021, 17 pada tahun 2022, dan 27 pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024 seluruh prodi mengadakan kerjasama dan MOA di Polines pada tingkat Nasional dan Internasional. Kerjasama nasional didominasi dengan kerjasama terkait pemagangan mahasiswa, serta terdapat kerjasama dalam hal tridharma seperti penelitian dan pengabdian. Sedangkan kerjasama internasional didominasi dengan kerjasama studi lanjut bagi dosen dan mahasiswa Polines.

1.8.2 Mahasiswa

Mahasiswa aktif di Polines pada tahun 2023 adalah berjumlah 7.160 mahasiswa yang terdiri dari 3.668 mahasiswa program studi Diploma 3, 3484 mahasiswa program studi sarjana terapan dan 8 mahasiswa program studi magister terapan. Pada tahun 2020 pendaftar berjumlah 33.351 kuota yang diterima sebesar 2.724. pendaftar pada tahun 2021 berjumlah 17.211 sedangkan yang diterima adalah sebanyak 2.648. pada tahun 2022 pendaftar sebanyak 16.468 yang diterima sebanyak 2.737 dan pada tahun 2023 jumlah pendaftar 14.015 dan jumlah yang diterima 3.174. Pada 2023 jumlah mahasiswa yang diterima meningkat karena banyaknya kelas baru yang dibuka oleh masing masing jurusan di Polines. Dalam upaya peningkatan animo calon mahasiswa, Polines telah melakukan promosi dan publikasi melalui website, media elektronik, media sosial, dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Prosedur dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Polines dilaksanakan dengan prinsip selektif, transparan dan akuntabel. Seleksi mahasiswa baru menerapkan beberapa bentuk tes, seperti Uji Kognitif, Uji Aptitude dan Uji Wawancara yang dilakukan melalui 11 jalur perekrutan mahasiswa.



Gambar 1.0-4. Pendaftar dan mahasiswa Aktif Polines

Seluruh informasi PMB dapat diakses secara melalui Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIMBA) 2022 pada laman <http://pmb.polines.ac.id> dan persyaratan calon mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Akademik Polines. Layanan kemahasiswaan yang dapat diberikan dalam bentuk kegiatan pengembangan softskills, minat dan bakat melalui bimbingan konseling dan Latihan Dasar Kedisiplinan (LDK). Layanan Penalaran, Minat dan bakat dilakukan melalui Kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat dilakukan melalui kegiatan berupa ekstrakurikuler yang difasilitasi melalui organisasi kemahasiswaan (ORMAWA). Baik yang ada ditingkat Prodi (Himpunan Mahasiswa Jurusan) maupun tingkat Polines (Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa), setiap mahasiswa dapat memilih organisasi yang terdiri dari 16 UKM.

Layanan mahasiswa lain dalam hal Kesejahteraan Mahasiswa diberikan melalui Beasiswa dengan Sumber dana beasiswa berasal dari pemerintah, yayasan dan perusahaan-perusahaan. Program Beasiswa berasal dari Bidikmisi, KIP, ADIK, Kitano (Jepang), Beasiswa PT. Djarum, beasiswa Gojek, beasiswa Panasonic, dan Pemerintah Kabupaten. Polines juga dilengkapi fasilitas kesehatan, fasilitas Olah Raga, dan fasilitas penunjang akademik melalui UPA Bahasa, UPA Perpustakaan, UPA Layanan Uji Kompetensi, UPA Perawatan dan Perbaikan, UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan UPA Pengembangan Teknologi dan Produk Unggulan.

1.8.3 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023 Jumlah pegawai Polines sebanyak 577 orang yang terdiri dari Dosen sebanyak 354 orang dan tenaga kependidikan 232 orang. Dari 354 orang tenaga pendidik, 59 orang diantaranya telah menyelesaikan Program Doktorat (S-3) sedangkan 295 orang lainnya mengenyam pendidikan terakhir master pada bidangnya masing-masing. Oleh karena itu rasio dosen S2 mengalami penurunan, sedangkan rasio dosen S3 mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Selain pendidikan formal dosen jabatan fungsional dosen juga tidak kalah penting, Polines memiliki 238 orang dosen (67,04%) telah menduduki jabatan fungsional Lektor ke atas pada Tahun 2022. Sedangkan sampai 2023 terdapat 236 orang (66,85%) dengan 276 Dosen telah memperoleh Sertifikasi Dosen. Pada tahun 2022-2023 banyak dosen senior yang pensiun sehingga mengurangi persentase jabatan fungsional lektor keatas.

Tabel 1.2. Jumlah SDM Polines

Jurusan	2021			2022			2023		
	S2	S3	Total	S2	S3	Total	S2	S3	Total
Jurusan Teknik Elektro	92	8	100	88	12	100	84	16	100
Jurusan Teknik Mesin	51	9	61	50	11	61	49	12	61
Jurusan Teknik Sipil	46	5	51	44	7	51	42	9	51

Jurusan Akuntansi	81	6	87	78	9	87	75	12	87
Jurusan Adm Bisnis	49	6	55	47	8	55	45	10	55
Jumlah Dosen	319	34	354	307	47	354	295	59	354
Persentase (%)	90%	10%		87%	13%		83%	17%	

Tugas pokok seorang dosen adalah melakukan tridharma perguruan tinggi, kegiatan tridharma tidak hanya dilakukan di Perguruan Tinggi tempat dosen mengajar saja tetapi bisa juga dilakukan di Perguruan Tinggi lain. Dari Total 354 Dosen tersebut Polines memiliki dosen yang berkegiatan tridharma di Perguruan Tinggi lain sebanyak 13 dosen di tahun 2020, 15 dosen di tahun 2021, 56 dosen di tahun 2022, dan 118 dosen di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Polines memiliki dosen yang diakui dikampus lain. Adapun dosen yang bekerja sebagai praktisi mengalami penurunan dengan 31 dosen di tahun 2020, 44 dosen di tahun 2021, 22 dosen di tahun 2022, dan 16 dosen di tahun 2023.

Selain melakukan tridharma perguruan tinggi, dosen juga mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kompetensi dosen tersebut. Sebanyak 138 dosen memiliki sertifikasi Kompetensi baik kompetensi teknis maupun asesor dan Profesi, meningkat 147 dosen di tahun 2021, 154 di tahun 2022 dan 162 di tahun 2023. Selain peningkatan kompetensi dosen, dalam rangka mengikuti perkembangan dan memenuhi standar industri, Polines juga mendatangkan pengajar dari dunia industri berjumlah 17 praktisi di tahun 2020, meningkat 25 praktisi di tahun 2021, 32 praktisi di tahun 2022, dan meningkat drastis 85 praktisi di tahun 2023. Peningkatan tinggi pada tahun 2023 adalah dikarenakan adanya program Praktisi Mengajar dari Dirjen Vokasi.

Polines didukung oleh 208 orang tenaga kependidikan yang terdiri dari 145 orang berstatus PNS, dan 63 orang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar pada Jurusan/Program Studi, Bagian, Unit Pelayanan Teknis, dan Kantor Pusat. Dari jumlah 208 orang tenaga kependidikan, jika dilihat dari jenjang pendidikan, terdiri dari S1 ke atas sebanyak 54 orang (25,9%), Diploma 3 sebanyak 60 orang (28,8%), dan di bawah Diploma 3 sebanyak 94 orang (45,2%) dengan didominasi Oleh pegawai dengan golongan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 41% dan Golongan III sebanyak 41%. Tenaga kependidikan di Polines sebagian besar didominasi oleh pendidikan dibawah D3. Hal ini karena jumlah tenaga kependidikan sebagai penunjang operasional seperti cleaning service, pramubakti, pendukung administrasi, pengemudi, satpam, dan tim kesehatan memerlukan tenaga yang lebih banyak dibandingkan dengan yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Polines.

1.8.4 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Luas lahan yang ditempati Polines sejak berdirinya sampai sekarang seluas 111.251 m² atau sekitar 11 hektar lebih. Dari luas lahan seluas itu, telah dipakai untuk gedung perkantoran dan pendidikan sebanyak 54.090 m², sisanya digunakan untuk jaringan, jalan, fasilitas, sarana, dan prasarana perkantoran lainnya, serta zona hijau/penghijauan kampus. Praktis. dari luas lahan yang dikelola tidak memungkinkan

lagi untuk pengembangan sarana prasarana perkantoran dan pendidikan. Pada tahun 2023, Polines mendirikan Gedung Kuliah Terpadu 8 Lantai dengan Luas lahan yang digunakan sebagai lokasi gedung kuliah terpadu Polines kurang lebih 1.061 m² terdiri dari 8 lantai dengan luas total menambah 9433 m². Gedung kuliah bersama saat ini dirasa sangat dibutuhkan mengingat proses pembelajaran yang dilaksanakan sekarang ini dilakukan dengan bergantian dan memanfaatkan waktu yang luang untuk menggunakannya. Saat ini, selain lahan untuk pendidikan tersebut di atas, Polines juga memiliki lahan perumahan dengan luas 3.640 m².

Capaian pendapatan Polines dalam 3 tahun terakhir (2020-2022) menjamin terlaksananya kegiatan tridharma perguruan tinggi serta investasi. Pendapatan anggaran rata-rata 3 tahun terakhir yang bersumber dari pemerintah sebesar Rp. 85.027.634.333, mahasiswa Rp. 39.417.726.333, kegiatan profesional/hibah dari eksternal sebesar Rp. 4.133.026.667 serta pendapatan yang bersumber dari dana lainnya/BOPTN sebesar Rp. 30.941.591.667. Sistem pembelajaran di Polines telah menyediakan Learning Manajement System (LMS) yang di rancang untuk mengurangi kendala pembelajaran online. LMS untuk proses pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa dan dosen melalui halaman: <https://elnino20212.Polines.ac.id/>.

Berbagai sarana prasarana yang ada di Polines berfokus terhadap ruang kuliah/laboratorium/bengkel/studio untuk mendukung Perkuliahan Vokasi yaitu 60% praktek dan 40% teori. Ketersediaan sarana prasarana yang mutakhir, fasilitas dalam kondisi terawat, dan merupakan hak milik sendiri dari Polines. Ruang kuliah Polines dibuat dengan penentuan kapasitas maksimal perkelas sebanyak 24-30 Mahasiswa. Pembagian jadwal perkuliahan kita atur sedemikian rupa dengan sistem perkelas adalah maksimal 8 jam perkuliahan. Jadwal perkuliahan di Polines dengan 2 shift, yaitu shift pertama pukul 07.00 -14.00 WIB dan shift kedua pukul 14.00 - 21.00 WIB. Jumlah Laboratorium/bengkel/studio tersebar di 5 Jurusan Polines sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepakaran sesuai dengan jurusan masing-masing. Fasilitas laboratorium/bengkel/studio tersebut dapat menunjang selama kegiatan perkuliahan, penunjang kompetisi lomba, tugas akhir atau skripsi, serta dapat digunakan dalam mendukung kegiatan Penelitian dan PkM. Perpustakaan yang ada di Polines menyediakan koleksi buku, teks, buku referensi, majalah, jurnal, audio video dan lain-lain, dapat diakses melalui tautan: <http://sitaka.polines.ac.id/> .

Di samping itu, perpustakaan juga mempunyai akses informasi ke referensi lain di dalam dan luar negeri. Koleksi Perpustakaan dapat diakses secara online (internet dan intranet). Layanan internet (hotspot) disediakan di setiap titik yang ada di Polines untuk mendukung setiap kegiatan akademik dan non akademik. Tersedia juga fasilitas penunjang yang ada di lokasi kampus, antara lain: Layanan Perbankan dan ATM, Koperasi mahasiswa, Pusat Kegiatan Mahasiswa, Kantin, Poliklinik, Fasilitas olahraga, Lahan parkir, Ruang tempat Ibadah (Masjid/ mushola). Selain dari berbagai sarana prasarana yang telah disampaikan, sarana lain yang mendukung proses pembelajaran yang mutakhir yaitu ketersediaan alat-alat/material/bahan yang ada di Laboratorium/bengkel/studio. Setiap peminjaman peralatan yang ada harus mengikuti SOP Peminjaman yang telah ditetapkan. Polines juga memiliki 3 sistem informasi sarana prasarana untuk mendukung proses monitoring penggunaan. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki Polines sudah baik untuk melayani kegiatan

pembelajaran, administrasi, keuangan dan pengembangan SDM. Polines memiliki fasilitas Information and Communication Technology (ICT) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK). Terdapat 9 Sistem Informasi (SI) yang mendukung proses penyelenggaraan akademik dan administrasi terkait Jumlah layanan akademik dan non akademik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi hingga saat ini.

Polines juga memiliki komitmen dalam layanan Sistem Informasi pendukung administrasi terdiri dari informasi kepegawaian, perencanaan kegiatan, informasi keuangan, tata persuratan, beasiswa, tracer study, dan berbagai sistem dalam hal perencanaan dan pemantauan administrasi akademik dan non akademik. Hingga saat ini terdapat 13 Sistem Informasi yang mendukung penyelenggaraan administrasi yang telah dibangun. Pengembangan sistem informasi pendidikan ataupun administrasi yang dilakukan oleh Polines sebagai upaya dalam hal pengelolaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana di masa yang akan datang. Kemudahan dalam hal menyebarkan ilmu pengetahuan melalui E-Learning, dan E-Library sebagai bentuk komitmen Polines untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh civitas akademika di lingkungan Politeknik Negeri Semarang. Oleh karena itu, berbagai sistem informasi yang saat ini dimiliki oleh Polines dilakukan sebagai upaya dalam proses pengelolaan dalam hal pengumpulan data secara cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terjaga kerahasiaannya.

1.8.5 Kurikulum

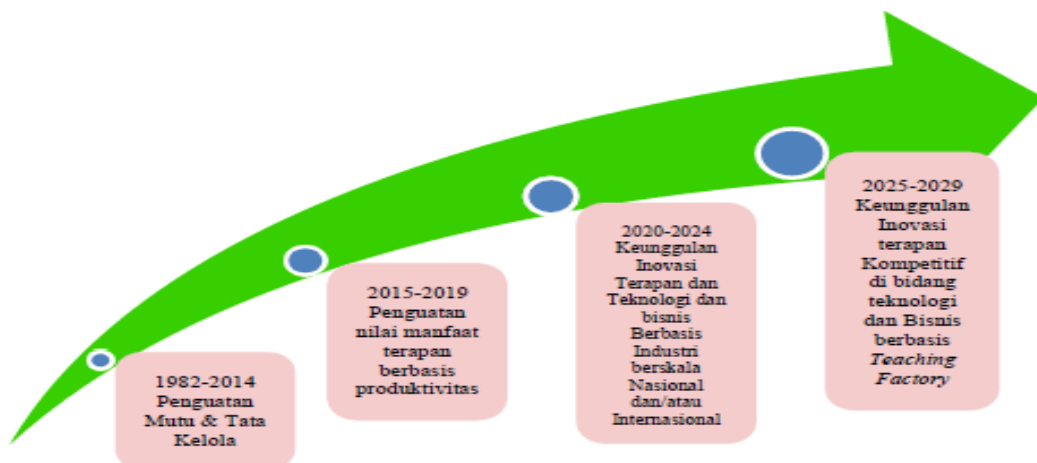
Kurikulum ditetapkan program studi mengacu pada KKNI baik program diploma tiga, sarjana terapan, dan magister terapan. Kurikulum berorientasi pada kebutuhan stakeholders. Untuk meningkatkan kualitas lulusan berbasis kompetensi, pengembangan program pembelajaran, program studi baru serta daya saing di tingkat nasional dan atau internasional, diperlukan kurikulum Polines yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan program studi. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dalam dokumen Kurikulum. Karakteristik kurikulum sistem pendidikan yang dilaksanakan di Polines yaitu (1) Program studi memiliki kurikulum sesuai dengan KKNI dan standar nasional pendidikan; (2) Jumlah SKS program diploma minimal 108 SKS dan Sarjana Terapan minimal 144 SKS; (3) Materi pembelajaran bersifat terapan, (4) Kurikulum dievaluasi secara berkala, yaitu program diploma tiga minimal 3 tahun, sarjana terapan 4 tahun, dan program magister 2 tahun; (5) Pendidikan dilaksanakan dengan sistem paket selama 6 (enam) semester untuk program Diploma 3, dan 8 (delapan) semester untuk program Sarjana Terapan, serta 4 (empat) semester untuk program Magister Terapan; (6) Proses pembelajaran dilaksanakan secara intensif dengan jumlah tatap muka 36 sampai dengan 40 jam per minggu; (7) Jumlah minggu perkuliahan setiap semester adalah 16 minggu (termasuk UTS), sedangkan UAS dilaksanakan pada minggu 17-18; (8) Alokasi waktu setiap jam perkuliahan adalah 45 menit; Memberikan porsi yang lebih besar pada mata kuliah praktek, dengan komposisi mata kuliah teori dan praktek adalah 40% : 60%; dan (9) Kurikulum program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Kurikulum yang dilaksanakan di Polines mengadopsi kurikulum yang mengakomodasi Praktik Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Pada kurikulum MBKM ini, prodi di Polines menerapkan metode pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Case Based Method* (CBM). Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Data jumlah mata kuliah yang menggunakan case method dan Pembelajaran kelompok berbasis project di Polines sebanyak 535 pada tahun 2021, 1.087 pada tahun 2022, dan 1.143 pada tahun 2023. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2021-2023 mengalami kenaikan jumlah matakuliah yang menerapkan metode PBL dan CMB.

Kurikulum disusun untuk dapat mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), selain mata kuliah yang mengutamakan perkuliahan praktikum, Polines juga Memiliki LSP P1 yang dapat melakukan uji kompetensi pada mahasiswa Polines. LSP P1 Polines memiliki total 31 Skema Sertifikasi Kompetensi. Sertifikasi Uji kompetensi dan Profesi ini diwajibkan oleh Polines untuk dimiliki Mahasiswa, pada tahun 2021 sebanyak 805 mahasiswa tersertifikasi, tahun 2022 sebanyak 781 mahasiswa tersertifikasi, dan pada tahun 2023 sebanyak 860 mahasiswa tersertifikasi. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2021-2023 mengalami kenaikan mahasiswa yang tersertifikasi.

1.8.6 Penelitian

Polines sebagai perguruan tinggi vokasi menitikberatkan pembelajaran dengan persentase 60% praktek di workshop/bengkel/laboratorium dan 40% teori di kelas. Metode pembelajaran mata kuliah praktek menjadi fokus memberikan kontribusi berupa hasil karya penelitian terapan mahasiswa berupa produk baik yang dihilirisasi dan digunakan oleh masyarakat maupun yang belum dihilirisasi. Produk hasil penelitian terapan mahasiswa tersebut berupa Teknologi Tepat Guna (TTG) hard engineering yang dihasilkan oleh mahasiswa Diploma 3 dan Sarjana Terapan baik dari Jurusan Teknik Mesin, Teknik Sipil maupun Teknik Elektro. Sementara hasil produk berupa sistem dan aplikasi dihasilkan oleh mahasiswa Diploma 3 dan Sarjana Terapan Jurusan Akutansi dan Administrasi Bisnis. menunjukkan perkembangan hasil penelitian terapan mahasiswa Polines yang berupa produk.



Gambar 1.0-5. Roadmap Penelitian

Polines memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Polines Tahun 2020-2024 (Perubahan) yang disahkan direktur dengan SK No. 0249/PL4.7.2/SK/2023 tentang Rencana Strategis Penelitian Polines Tahun 2020-2024 (Perubahan). Pada renstra penelitian Polines terdapat 5 (lima) topik utama penelitian berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 dan pelaksanaan program dana padanan dimana kerjasama nyata dengan industri menjadi keunggulan dari Polines. Topik utama penelitian tersebut antara lain: Ekonomi hijau, ekonomi biru, kemandirian kesehatan, ekonomi digital dan pengembangan pariwisata.

Tabel 1.3. Topik dan Sub-Topik Penelitian

Topik Utama	Sub-Topik
Ekonomi Hijau	Energi baru terbarukan, pembangkit energi dengan studi kasus industri, sistem pembangkit energi cerdas, kendaraan listrik, sistem dan teknologi pendukung pertanian cerdas dan sustainable, sistem dan teknologi pendukung peternakan dan perikanan cerdas dan sustainable, industrial sustainability, mitigasi bencana darat, pengolahan limbah, material cerdas pendukung sustainability, green building, smart building, smart city, pemanfaatan listrik secara optimum, water resources management dan smart transportation
Ekonomi Biru	Pengembangan perikanan dan hasil pengolahan perikanan berkelanjutan, pengembangan sistem dan teknologi pendukung penangkapan ikan cerdas, mitigasi bencana laut, energi laut untuk pembangkit listrik
Kemandirian Kesehatan	Material cerdas pendukung kesehatan, alat diagnosa, alat bantu kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi cerdas pendukung industri kesehatan, sistem dan teknologi pencegahan stunting, sistem dan teknologi reproduksi cerdas, sistem dan teknologi cerdas terkait obat dan obat alam, sistem informasi cerdas pendukung pengembangan kesehatan
Ekonomi Digital	Sistem informasi cerdas pendukung pengembangan UMKM dan industri, Teknologi pendukung produktivitas dan efektivitas UMKM dan industri,
Pengembangan Pariwisata	Sistem informasi cerdas pendukung pengembangan pariwisata, teknologi pendukung pengembangan pariwisata

Pendanaan penelitian Polines bersumber dari dana internal dan eksternal. Sumber dana internal berasal dari dana DIPA. Sumber dana eksternal diperoleh dari kompetisi yang terdiri dari beberapa skema antara lain: (i) Kemendikbudristek, Direktorat Jendral Vokasi melalui aplikasi BIMA dan BRIN, (ii) Lembaga/Kementerian di luar Kemendikbudristek Dikti dan BRIN, (iii) Pemerintah Daerah, (iv) Kerjasama Luar Negeri dan (v) Kerjasama dengan pihak lain di luar pemerintah (masyarakat umum dan DUDI). Data menyebutkan capaian jumlah dosen yang memperoleh hibah bersaing penelitian dari berbagai sumber (sumber eksternal) pada tahun 2019 sebanyak 30 orang, pada tahun 2020 sebanyak 31 orang dan pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 32 orang.

Jika angka tersebut disajikan dalam bentuk persentase maka sebesar 8% dari seluruh jumlah dosen Polines yang aktif mendapatkan dana hibah bersaing dari sumber eksternal. Sementara keterlibatan dosen Polines dalam kegiatan penelitian dengan pendanaan internal sebesar 100%.

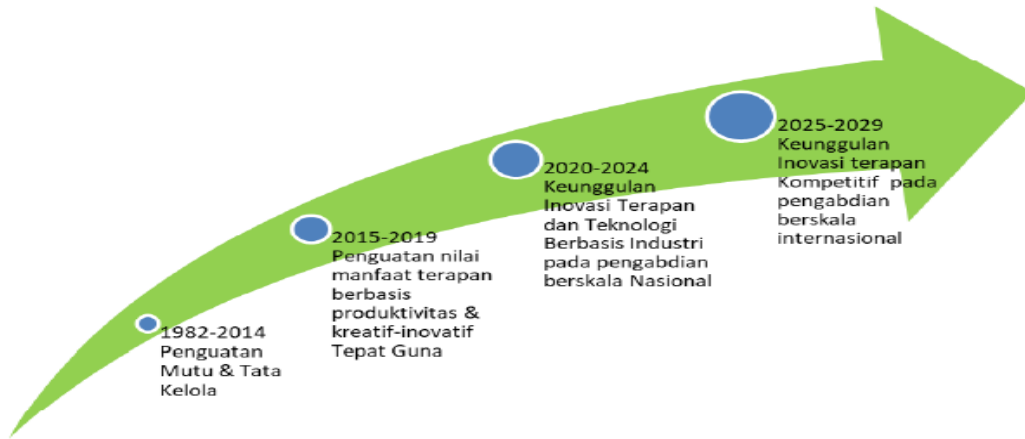
Tabel 1.4. Capaian Penelitian

Keterangan	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Hasil Karya Penelitian Terapan Mahasiswa (Berupa Produk)	Karya	75	78	128	136	150
Hasil karya penelitian terapan mahasiswa yang dapat dihilirisasi ke pasar/ masyarakat/ industri	Karya	0	4	48	48	55
Dosen yang memperoleh hibah bersaing penelitian dari berbagai sumber	Orang	30	31	32	32	35
Hasil penelitian terapan Dosen yang dipublikasikan	Penelitian	288	240	247	177	200
Hasil penelitian terapan Dosen yang dihilirisasi ke pasar/industri/masyarakat	Penelitian	10	10	11	12	15
HAKI/paten yang diperoleh	HAKI	23	34	46	77	85
Matching Fund yang diperoleh	Proposal	0	0	4	19	3

*) proyeksi

1.8.7 Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Polines 2016-2020 yang disahkan oleh Direktur dengan SK No. 0376A /PL4.7.2 / SK/ 2016. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Polines memiliki tema utama: Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, pola pengabdian pada masyarakat Polines memiliki sasaran jangka panjang yaitu terbentuknya masyarakat sadar teknologi (knowledge based society), dengan peta jalannya pengabdian tahun 2020-2024.



Gambar 1.0-6. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun bidang fokus pengembangan pengabdian kepada masyarakat meliputi tujuh fokus yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Penelitian Polines yang mengacu pada RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) yaitu : 1. Energi dan konversi energi; 2. Beton, struktur, geoteknik, manajemen konstruksi dan transportasi; 3. Rekayasa material, inovasi teknologi tepat guna dan industri; 4. Teknologi informasi dan telekomunikasi; 5. Ekonomi, Manajemen dan kewirausahaan; 6. Sosial, humaniora, seni budaya, pendidikan; 7. Teknologi penanggulangan dan mitigasi bencana. Untuk dapat mencapai visi pengabdian kepada masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, Polines (dalam hal ini P3M sebagai pengelola) menentukan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yaitu (1) sistem peningkatan ekonomi masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis secara kreatif dan inovatif sesuai dengan keunikan bidang ilmu, (2) teknologi dan produk inovatif berbasis lokal dan berdaya guna tinggi dan (3) optimalisasi potensi bisnis lokal untuk pemberdayaan masyarakat.

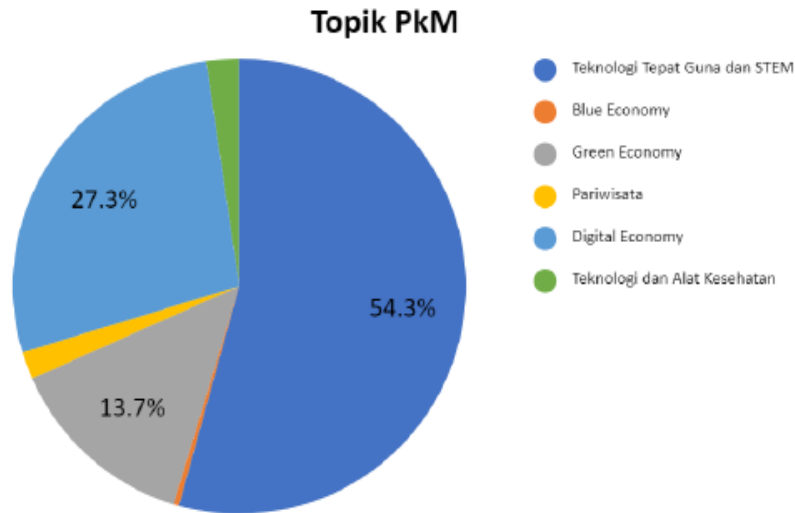
Kegiatan PkM tentunya melibatkan banyak sumber daya, salah satunya adalah keikutsertaan mahasiswa agar mencapai tujuan yang diinginkan. Pilihan skim/ skema yang ada membuat banyak dosen dan mahasiswa dapat ikut terlibat kegiatan PkM. Jumlah PkM selama 3 (tiga) tahun terakhir (program Diploma 3/Sarjana Terapan) tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.5. Jumlah Judul PkM Tahun 2020-2022

NO	SKIM PENGABDIAN	JUMLAH JUDUL				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengabdian Kepada Masyarakat (DIPA)	102	122	122	122	122
2	IbIKK/PIPK	-	-	2	-	-

NO	SKIM PENGABDIAN	JUMLAH JUDUL				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	IbM/PKM/PIM	4	3	4	-	-
4	PPDM	1	-	-	-	-
5	PPPUD	3	2	-	-	-
6	DPTM/PPTDM	2	-	-	6	4
Total Per Tahun		112	127	128	128	126

Dari data jumlah judul PkM selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut, dosen melibatkan mahasiswa dalam tahapan kegiatan selama PkM berlangsung, mulai dari penyusunan proposal hingga laporan PkM. Berdasarkan peta jalan PkM Polines yang diturunkan menjadi peta jalan prodi, khususnya pada tahun 2022 yang difokuskan pada tahapan optimalisasi potensi daerah yang dapat digunanakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, dimana sebagian judul PkM yang dilaksanakan melibatkan mahasiswa telah sesuai dengan peta jalan dan bidang keilmuan prodi. Berikut adalah contoh bukti keterlibatan mahasiswa yang disebutkan pada lembar pengesahan laporan PkM yang sesuai dengan tema PkM pada peta jalan. PkM Polines mayoritas didanai oleh pendanaan internal melalui dana DIPA, namun secara rutin memperoleh pendanaan dari pihak eksternal seperti hibah, kolaborasi, dan lainnya. Polines berhasil memperoleh kinerja PkM Polines dengan total 112 PkM pada tahun 2020, 127 pada tahun 2021 dan 128 pada tahun 2022. Pelaksanaan pengabdian ini juga telah melibatkan mahasiswa untuk melakukan pengabdian baik bersama dosen maupun mandiri dengan total 244 mahasiswa di tahun 2022. Data mengenai capaian kinerja PkM Polines tampak pada tabel 17 berikut. Dari Pelaksanaan PkM tersebut, didominasi oleh pengabdian dengan topik Teknologi Tepat Guna (TTG) dan STEM sebesar 54.3% dan *Digital economy* sebesar 27.3%. besaran sebaran topik PkM Polines tampak pada gambar 1.6 berikut:



Gambar 1.0-7. Topik PkM

1.8.8 Luaran Tridharma

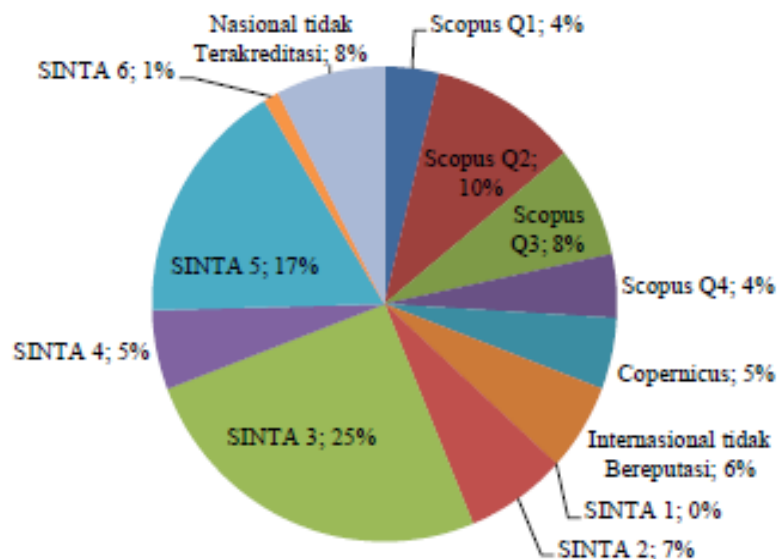
Tabel 1.5. Capaian dan Perbandingan Indikator Jumlah Lulusan yang Memiliki Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta

Tahun	2020		2021		2022		2023	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Jumlah Lulusan	1322		1419		1484		1658	
Lulusan Bekerja	354	26,78%	619	43,62%	480	32,35%	1035	62,42%
Studi	86	6,51%	31	2,18%	18	1,21%	80	4,83%
Wiraswasta	26	1,97%	27	1,90%	11	0,74%	39	2,35%

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah lulusan Polines dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dengan terakhir lulusan Polines pada tahun 2023 berjumlah 1.658 orang. Berdasarkan data responden tersebut didapatkan kenaikan tiap tahun pada mahasiswa yang bekerja dari tahun 2020 sebesar 27% menjadi 62% di tahun 2023. Data mahasiswa yang berwiraswasta mengalami kenaikan dari 1,97% di tahun 2020 menjadi 2,35% di tahun 2023. Data tracer ini mengalami penurunan pada tahun 2022 namun tidak signifikan. Data ini masih belum menggambarkan nilai lulusan yang sebenarnya karena tingkat pengisian data tracer selama 4 tahun terakhir berada pada kisaran 52%. Saat ini Polines tengah berupaya untuk dapat meningkatkan jumlah lulusan yang mengisi data tracer.

Di tahun 2023, jumlah mahasiswa menjalankan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi tercatat 446 mahasiswa atau sebesar 7,10% dari total jumlah mahasiswa sarjana terapan dan diploma tiga aktif pada awal tahun 2023 sebanyak 6.279 orang. Capaian tersebut didapatkan dari pelaksanaan program merdeka belajar yaitu pertukaran pelajar (program IISMA), program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB Batch 4 dan Batch 5), Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Sedangkan capaian mahasiswa yang meraih prestasi, di Tahun 2023 tercatat terdapat 97 mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, atau 1,54% dari total mahasiswa.

Polines memiliki keluaran dosen yang mendapatkan rekognisi internasional sebanyak 70 luaran pada tahun 2023, hal ini meningkat 4 luaran dari tahun 2022 sebesar 66. Kemudian luaran dosen yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah pada tahun 2023 sebesar 44, hal ini meningkat drastis dari 18 di tahun 2022. Peningkatan signifikan ini dikarenakan pada Tahun 2022 mengalami penurunan drastis. Hal ini Disebabkan karena pada triwulan 4, ada perubahan target yang harus mengikuti golden standard satuan kerja BLU menjadi rasio 100 dengan jumlah dosen, karena diberlakukannya Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang IKU PTN dan LLDikti. Namun secara kuantitas, jumlah luaran dosen yang mendapatkan rekognisi internasional maupun diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah luaran lainnya berupa publikasi artikel ilmiah Polines mayoritas dilakukan pada sinta 3 sebesar 25% pada kurun waktu 2020-2023. Dosen Polines juga telah mampu untuk melakukan publikasi pada artikel terakreditasi internasional terindeks scopus, copernicus dan indeks lainnya. Grafik 10 menunjukkan indeks artikel ilmiah.



Gambar 1.6. Luaran Publikasi Artikel Ilmiah Dosen Polines 2020-2023

1.9 Potensi dan Permasalahan

1.9.1 Potensi

Sebagai satuan kerja yang telah menerapkan PK-BLU, Polines mempunyai satu sasaran kinerja yang diperjanjikan dengan Kementerian Keuangan, yaitu pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan empat indikator yaitu rasio pendapatan terhadap biaya operasional, realisasi pendapatan, realisasi pendapatan dari optimalisasi aset, dan persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU. Penerimaan BLU Polines dari layanan pendidikan sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 63.081.468.000,-. Bertambahnya penerimaan BLU dari layanan Pendidikan salah satu faktornya yaitu bertambahnya mahasiswa pada tahun 2023. Untuk penerimaan BLU dari non- pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2023 mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 12.260.410.031,-.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Polines sudah memiliki Sistem Manajemen Mutu Pendidikan dan adanya Struktur Satuan Pengawas Internal (SPI) dan implementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang dapat meningkatkan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan efisiensi dalam hal perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan. Polines memiliki 12 sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan baik, seperti Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Sistem Informasi Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama, Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Katalog Pustaka, Sistem Informasi Indeks Artikel Jurnal Ilmiah, Sistem Informasi Beasiswa, Sistem Informasi Tracer Study, Sistem Informasi Perencanaan, Sistem Informasi Tata Persuratan Internal, Sistem Informasi Keputusan Direktur. Hal tersebut berbanding lurus dengan hasil penilaian modernisasi pengelolaan BLU pada tahun 2023 yaitu 91,94%.

Dalam hal pelaporan proyeksi pendapatan maksimal 3 bulan berkenaan menunjukkan hasil yang positif, dimana selama tiga tahun terakhir target capaian tercapai semuanya. Kesesuaian perencanaan dengan realisasi maksimal 3 bulan juga menunjukkan hasil yang positif dimana selama tiga tahun terakhir target capaian tercapai semuanya. Sesuai Kepmendikbudristek No. 210/M/2023, dalam indikator ini, terdapat dua kriteria atau kelompok capaian, yaitu mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan mahasiswa yang meraih prestasi. Untuk prestasi akademik mahasiswa minimal tingkat nasional selalu meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2023 terdapat 97 mahasiswa meraih prestasi minimal tingkat nasional. Sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi no. 27 tahun 2022 tentang konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan instrumen suplemen konversi, akreditasi program studi yang tersebar pada lima Jurusan di Polines, sampai akhir tahun 2023 terdapat 1 Prodi terakreditasi Internasional, dan 9 Prodi terakreditasi Unggul. Perolehan tersebut sangat positif dimana pada tahun sebelumnya belum ada prodi terakreditasi unggul karena masih menggunakan peringkat akreditasi yang lama yaitu A.

Polines telah melakukan berbagai perubahan dalam pengelolaannya yang lebih baik seperti pada peningkatan kualitas lulusan sampai pada pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang vokasi. Sejalan dengan hal tersebut rerata IPK lulusan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan pada tahun 2023 kualitas mahasiswa sudah memenuhi target dengan IPK rata-rata 3,66. Berkaitan dengan kelas yang bekerjasama dengan mitra mendapatkan hasil capaian yang positif dimana pada setiap tahun

mengalami peningkatan jumlah kelas kerjasama, yaitu pada tahun 2021 terdapat 25 kerjasama, tahun 2022 terdapat 26 kerjasama, dan tahun 2023 terdapat 27 kerjasama. Berkaitan dengan daya saing lulusan, Polines sudah melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan yaitu memberikan fasilitas berupa sertifikasi kompetensi, peningkatan kelas kerjasama, pengadaan *jobfair*, serta memberikan bekal ilmu berwirausaha. Hal tersebut sejalan dengan persentase lulusan dengan waktu tunggu lulusan maksimal 6 bulan (BMW) memenuhi target capaian dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 63% dari jumlah lulusan. Lulusan yang bekerja sesuai bidangnya juga menunjukkan hasil yang memenuhi target capaian dan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2021: 15%, 2022: 69%, dan 2023: 7%. Sedangkan untuk berkaitan dengan lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi dalam tiga tahun terakhir sempat mengalami penurunan tetapi masih menghasilkan tren yang positif, yaitu pada tahun 2023 terdapat 50,67% mahasiswa yang tersertifikasi.

Mahasiswa sering mengikuti perlombaan atau diikutsertakan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen, kegiatan tersebut memungkinkan adanya produk dari mahasiswa yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat industry. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan mahasiswa mandiri atau Bersama dosen dan diterapkan oleh Masyarakat/industry menghasilkan nilai capaian yang positif yaitu setiap tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 45 produk.

Berkaitan dengan Lulusan yang bekerja di perusahaan tingkat Nasional menghasilkan nilai capaian yang positif yaitu pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 71% lulusan. Sesuai Kepmendikbudristek No. 210/M/2023, dalam indikator ini, terdapat dua kriteria atau kelompok capaian, yaitu mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan mahasiswa yang meraih prestasi. Untuk prestasi non akademik mahasiswa minimal tingkat nasional selalu meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2023 terdapat 18 mahasiswa meraih prestasi non akademik minimal tingkat nasional. Sedangkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus dalam tiga tahun terakhir terdapat penurunan jumlah capaian pada tahun 2023 yaitu sebanyak 446 mahasiswa menurun dari tahun sebelumnya, tetapi masih menghasilkan tren yang positif. Berkaitan dengan mahasiswa penerima beasiswa dalam tiga tahun terakhir mengalami naik turun setiap tahunnya tetapi masih menghasilkan tren yang positif selama tiga tahun tersebut, hasil capaiannya yaitu pada tahun 2021 penerima beasiswa sebanyak 18% dari jumlah mahasiswa, tahun 2022 penerima beasiswa 21% dari jumlah mahasiswa, dan tahun 2023 penerima beasiswa 20% dari jumlah mahasiswa.

Dalam penerimaan mahasiswa Polines melakukan beberapa strategi yaitu membuka penerimaan dengan beberapa jalur salah satunya jalur prestasi. Dengan bertambahnya kuota penerimaan mahasiswa bertambah juga kuota jalur prestasi, hal tersebut sejalan dengan hasil capaian kinerja jumlah mahasiswa baru dari jalur prestasi dimana dalam tiga tahun terakhir mengalami naik turun setiap tahunnya tetapi masih menghasilkan tren yang positif selama tiga tahun tersebut, hasil capaiannya yaitu pada tahun 2021 sebanyak 338 mahasiswa, tahun 2022 sebanyak 282 mahasiswa dan tahun 2023 sebanyak 966 mahasiswa.

Berkaitan pengembangan luas lahan dan bangunan polines selama tiga tahun terakhir baru mulai ada pengembangan pada tahun 2023 yaitu terbangunnya Gedung kuliah terpadu, dengan adanya penambahan bangunan tersebut membuat capaian kinerja indicator tersebut mempunyai tren yang positif. Dalam kegiatan pembelajaran supaya dapat berjalan dengan lancar perlu ditentukan rasio dosen terhadap mahasiswa, sejalan dengan hal tersebut Polines juga menetapkan rasio dosen terhadap mahasiswa, dimana dalam tiga tahun terakhir memiliki tren yang positif yaitu pada tahun 2021 memiliki rasio 9,5, tahun 2022 memiliki rasio 9,25, dan pada tahun 2024 memiliki rasio 9,77.

Dalam meningkatkan kualitas tridharma, Polines melakukan kerjasama dengan beberapa kampus lain dalam bidang pengajaran maupun bidang penelitian dan pengabdian. Hal tersebut sejalan dengan persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain dalam tiga tahun terakhir memiliki tren yang positif, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 118 dosen yang melakukan tridharma di kampus lain. Selain kerjasama dengan kampus lain, Polines juga melakukan kerjasama dengan industry dalam bentuk mengundang praktisi industry untuk mengajar dikampus. Hal tersebut sejalan dengan jumlah dosen yang berasal dari industry (dosen praktisi) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2021 sebanyak 25 dosen praktisi, pada tahun 2022 sebanyak 32 dosen praktisi, dan pada tahun 2023 sebanyak 85 dosen praktisi.

Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen, beberapa dosen mengikuti sertifikasi kompetensi dengan mengikuti program sertikom dari Direktorat Jenderal Vokasi maupun secara mandiri. Hal tersebut sejalan dengan jumlah dosen yang bersertifikat kompetensi/profesi/industry dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2021 sebanyak 147 dosen bersertifikat, pada tahun 2022 sebanyak 154 dosen bersertifikat, dan pada tahun 2023 sebanyak 162 dosen bersertifikat. Dalam hal akreditasi, sejak Tanggal 20 Desember 2016 Polines telah berhasil mendapatkan status akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat A dengan nilai 366, sesuai dengan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2987/SK/BANPT/Akred/PT/XI/2016 Tanggal 20 Desember 2016 dan telah diterbitkan Kembali Keputusan BAN-PT No. 1062/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 Tanggal 22 Desember 2021, yang berlaku untuk lima tahun ke depan.

Setiap semester dosen Polines wajib melakukan tridharma perguruan tinggi salah satunya yaitu di bidang penelitian dan pengabdian. Penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen polines merupakan penelitian dan pengabdian terapan, dimana hasil penelitian dan pengabdian diharapkan dapat diaplikasikan di masyarakat / industri. Sejalan dengan hal tersebut Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat/industry selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 45 penelitian dan pengabdian yang diterapkan di Masyarakat/industry. Polines juga menerapkan kebijakan mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen, hal tersebut sejalan dengan Jumlah penelitian dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa (Program Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan) dalam tiga tahun terakhir mengalami naik turun, tetapi masih mempunyai tren yang positif dimana pada tahun 2023 terdapat 270 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian.

Dalam rangka pencapaian kualitas penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja Polines, telah dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan membandingkan antara target dan capaiannya. Capaian IKU diukur berdasarkan revisi akhir Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan predikat SAKIP Satker BLU pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan mendapatkan nilai yang tinggi, pada tahun 2023 mendapatkan nilai 89,25.

Berkaitan dengan penelitian dosen polines terdapat beberapa yang dibiayai dari luar PT dalam bentuk Hibah penelitian maupun jenis lain, hal tersebut sejalan dengan jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT selama tiga tahun terakhir mengalami naik turun setiap tahunnya tetapi masih dalam tren yang positif, dimana pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 38 penelitian yang dibiayai dari luar PT. Polines memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal tersebut sejalan dengan status ZI pada tahun 2023 mendapatkan nilai yang tinggi yaitu 84,89.

Dalam meningkatkan mutu pembelajaran dosen polines menerapkan beberapa metode pembelajaran, salah satunya yaitu metode Problem Based Learning (PBL), dimana dengan beban tatap muka setiap SKS di polines cukup banyak sehingga memungkinkan untuk menerapkan metode tersebut. Hal tersebut sejalan dengan persentase mata kuliah PBL dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebanyak 31,2% matakuliah menerapkan PBL, pada tahun 2022 sebanyak 66,7% matakuliah menerapkan PBL, dan pada tahun 2023 sebanyak 70,4% matakuliah menerapkan PBL. Untuk meningkatkan kualitas luaran penelitian, polines menerapkan kebijakan mewajibkan penelitian dengan anggaran yang cukup benar salah satu luarannya berupa HKI, hal tersebut sejalan dengan jumlah luaran dosen yang berupa HKI selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 44 luaran HKI.

1.9.2 Masalah

Polines sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 pada 7 Juni 2021. Dengan perubahan status ini maka Polines memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan. Akan tetapi, hal ini tidak membuat Polines bebas dari permasalahan. Permasalahan di bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian, bidang kemahasiswaan dan lulusan, bidang sumber daya manusia, tata kelola dan kerjasama masih terjadi di Polines.

Pada tahun 2024 ini Polines telah memiliki 1 kelas internasional pada Prodi Komputerisasi Akuntansi (Prodi Kompak) dimana Prodi tersebut telah mendapatkan akreditasi internasional dari HEAECT. meskipun teaching factory berperan penting dalam pendidikan vokasi, Polines masih belum memiliki Teaching Factory. hal ini menjadi masalah karena kerjasama polines dengan industri yang kuat dapat didorong untuk membentuk teaching factory. Polines memiliki potensi pada penelitian dan pengabdian yang dilakukan, tetapi Penelitian dan pengabdian yang dilakukan belum diintegrasikan kedalam pembelajaran. hal ini dikarenakan Penelitian dan pengabdian yang dilakukan belum sejalan dengan pengajaran yang dilakukan. Di bidang penelitian dan pengabdian, Polines memiliki masalah pada penelitian dan pengabdian di Polines

yang mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal yang masih rendah. Polines masih bergantung pada pendanaan internal untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Jumlah buku atau book chapter ber-ISBN di Polines yang masih rendah. Buku Ber-ISBN Polines terbentur pada permasalahan pengajuan ISBN Polines yang masih menggunakan pihak ketiga. Sitasi karya ilmiah dosen Polines yang masih rendah, karena di Polines penelitian.

Jumlah pendaftar yang terus menurun dalam tiga tahun terakhir yaitu 17.246 di tahun 2021 dan 14.009 di tahun 2023. Penurunan jumlah pendaftar ini mengindikasikan bahwa Polines kurang diminati oleh calon mahasiswa perguruan tinggi. Selain jumlah pendaftar yang menurun, Polines juga menghadapi permasalahan dengan belum memiliki mahasiswa asing yang masuk ke Polines. Hal ini diakibatkan karena Polines hanya memiliki 1 Prodi dengan akreditasi internasional. Akreditasi internasional ini penting kaitannya untuk memperoleh mahasiswa asing inbound melalui skema kerjasama internasional. Pada bidang sumber daya manusia, Polines memiliki masalah utama pada dosen dengan jabatan lektor kepala yang berkurang dan terancam mengalami drop karena banyak dosen berjabatan lektor kepala yang akan pensiun dalam waktu dekat. Hal ini menjadi permasalahan karena komponen penilaian akreditasi baik itu program studi maupun institusi pada bagian SDM adalah dosen dengan jabatan lektor kepala. Selain dosen dengan jabatan lektor kepala, Polines juga bermasalah dengan dosen yang berpendidikan S3, karena Pendidikan vokasi selama ini berfokus pada pengembangan kompetensi teknis Dosen. Jumlah Dosen Polines yang menjadi anggota organisasi profesi dan menjadi Praktisi di Industri masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya kurangnya pemanfaatan Pasal 23 UU ASN dan Pasal 4 PP 94/2021 yang membolehkan PNS untuk memiliki usaha sampingan. Adanya UU ASN ini dapat membuka peluang Dosen PNS di Polines untuk dapat mengembangkan usaha melalui pemanfaatan kompetensi untuk terjun dalam dunia praktisi.

Di Bidang kerjasama Polines memiliki masalah pada pengukuran kinerja baik itu anggaran maupun layanan. Polines masih belum maksimal pada nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL karena pelaksanaan anggaran yang tidak terdistribusi merata di tiap triwulan tapi terkonsentrasi pada triwulan akhir. Selain itu kecepatan penyelesaian temuan audit yang masih lambat. Kemudian di sisi layanan, Polines masih rendah dalam penilaian kepuasan pengguna lulusan yang masih rendah dalam memberikan penilaian. Hal ini dikarenakan penilaian kepuasan pengguna lulusan yang belum tersistem sehingga perlu usaha untuk pengguna lulusan mengisi penilaian lulusan. Selain pengguna lulusan, Polines juga belum memiliki penilaian indeks kepuasan layanan yang terintegrasi dengan baik. Indeks kepuasan layanan belum menyeluruh ke semua layanan, sehingga pengawasan dan implementasi perbaikan layanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hingga saat ini Polines masih terkendala dalam luas lahan dan bangunan kampus dikarenakan lahan Polines yang sangat terbatas untuk dapat membangun kembali. Oleh karena itu, Polines memerlukan pengembangan kampus dua diluar domisili kampus yang sekarang.

Polines memiliki kerjasama dengan berbagai industri dan instansi, namun kerjasama itu banyak yang berhenti pada MOU dan pelaksanaan magang saja. Belum dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai macam hal seperti pengembangan inkubator bisnis, Teaching Factory, Project based learning education, dll. Pelaksanaan pengembangan kerjasama ini juga terkendala pada laboratorium, bengkel atau studio

yang belum diakreditasi atau disertifikasi. terkadang pemanfaatan laboratorium, bengkel atau studio Polines oleh industri terkendala masalah akreditasi atau sertifikasi ini.

1.10 Isu Strategis

Berdasarkan Masalah diatas didapatkan isu Strategis yang akan diselesaikan Polines dalam 5 tahun kedepan yaitu:

1. Sistem pendataan Kepuasan pengguna dan Kepuasan layanan Polines yang masih rendah
2. Rendahnya Daya Tarik Polines di masyarakat
3. Masih rendahnya Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala
4. Dosen berkualifikasi S3 yang masih rendah
5. Pengembangan kampus yang terbatas pada luas wilayah
6. Polines yang masih belum memiliki dan belum mengimplementasikan Teaching Factory.
7. Rekognisi Penelitian dan Pengabdian yang masih rendah di tingkat Nasional
8. Implementasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran yang masih rendah

1.11 Pemosisian Strategis Polines

Pemosisian strategis Polines dirumuskan dengan menentukan Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) dan External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS). Penentuan dua faktor ini didasarkan pada Potensi dan masalah yang sudah diuraikan pada poin 1.9.1 dan 1.9.2 skor yang dinilai dengan mempertimbangkan rating dan bobot. Rating menggambarkan seberapa penting sebuah indikator dalam instansi, sedangkan bobot menentukan seberapa besar dampaknya sebuah indikator kepada instansi. Setelah didapatkan skor tersebut maka dikelompokkan menjadi indikator yang mendapatkan nilai tinggi di tiap dimensi untuk dapat membentuk skor IFAS dan EFAS berdasarkan dimensi utama. pada tabel berikut : IFAS dan EFAS dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 1.6. Skor IFAS

	Rating	Bobot	RxB
STRENGTH			
S1 : Program Studi Terakreditasi Unggul	9	0,080	0,72
S2 : Kualitas Lulusan dan Berdaya Saing	9	0,094	0,82
S3 : Dosen yang memadai dalam pengajaran	9	0,095	0,83
S4 : Pendapatan BLU yang meningkat	8	0,076	0,64
S5 : Kualitas Kurikulum dengan pembelajaran PBL dan CM yang relevan dengan industri	8	0,061	0,51
S6 : Luaran Penelitian yang banyak diterapkan ke Masyarakat	8	0,076	0,64
SKOR Strength			4,16
WEAKNESESS			
W1 : Sistem pendataan kepuasan pengguna yang masih kurang	9	0,100	0,89

W2 : Daya Tarik dan Branding Polines yang masih rendah	9	0,075	0,68
W3 : Rendahnya Dosen dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Berkualifikasi S3	8	0,075	0,62
W4 : pengembangan kampus yang terbatas	9	0,095	0,83
W5 : Belum adanya Tefa	9	0,099	0,89
W6 : Rendahnya Rekognisi penelitian dan Pengabdian di tingkat nasional dan implementasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran yang masih rendah	8	0,075	0,63
SKOR Weaknessess			4,54
Total SKOR IFAS			8,70

Tabel 1.7. Skor EFAS

	Rating	Bobot	RxB
OPPORTUNITIES			
O1 : Meningkatnya Permintaan tenaga kerja yang cepat	9	0,097	0,87
O2 : Banyak Peluang kerjasama dan kolaborasi industri	7	0,068	0,48
O3 : Semakin meningkatnya program hibah penelitian dan pengabdian	7	0,078	0,55
O4 : Meningkatnya kesempatan Beasiswa S3 untuk dosen	8	0,137	1,09
O5 : Transformasi Digital pada pengelolaan pendidikan tinggi	8	0,068	0,54
O6 : Meningkatnya Program pengembangan dosen dan mahasiswa diluar kampus	7	0,097	0,68
Skor Oppportunities			4,21
THREATS			
T1 : Tingkat Persaingan yang semakin ketat dengan PT Lain	8	0,065	0,52
T2 : Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah	9	0,087	0,78
T3 : Tuntutan akreditasi Prodi dan institusi yang semakin meningkat	9	0,059	0,53
T4 : Tuntutan fasilitas pendidikan yang makin baik dan canggih	8	0,073	0,59
T5 : Perubahan Teknologi di Industri yang dinamis dan cepat	8	0,098	0,78
T6 : Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan industri	8	0,073	0,59

Skor Threats	3,79
TOTAL SKOR EFAS	8,00

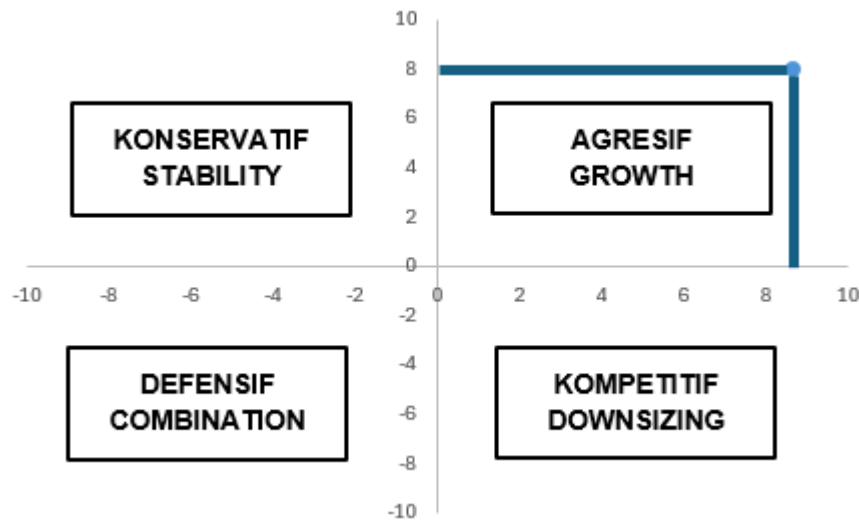
Setelah mendapatkan skor IFAS dan EFAS seluruh faktornya, maka disusun strategic factor analysis summary (SFAS) seperti berikut:

Tabel 1.8. Strategic Factor Analysis Summary (SFAS)

Analysis Factor	Dimensi	Total Skor	Koordinat
IFAS	Strengths	4,16	8,70
	Weaknessess	4,54	
EFAS	Opportunities	4,21	8,00
	Threats	3,79	

Berdasarkan tabel 1.8. menunjukkan bahwa nilai Strength sebesar 4,16 dan Weaknessess sebesar 4,54 dengan total nilai IFAS sebesar 8,70. Sedangkan nilai Opportunities 4,21 dan Threats sebesar 3,79 dengan total EFAS 8,00. Hasil skor tersebut menjadi koordinat untuk pemosisian strategis pada gambar berikut:

menentukan pemosisian Polines sebesar 2,45 pada kuadran strategi berikut.



Gambar 1.0-8. Pemosisian Polines

Gambar diatas menunjukkan Pemosisian Polines pada strategi *Growth* atau pertumbuhan. strategi ini menunjukkan bahwa polines harus membuat pertumbuhan atau pengembangan terkait tata kelola layanan BLU, menambah atau mengembangkan sistem untuk mendapatkan masukan dari civitas akademika Polines yang digunakan untuk pengembangan program yang berkelanjutan, penambahan sertifikasi baru, promosi kampus ke calon mahasiswa pada tempat dengan demografi diluar Jawa Tengah, mendirikan kampus di daerah lain dengan memanfaatkan kerjasama, pengembangan kompetensi dan jabatan dosen, laboran dan tendik, pengembangan perkuliahan hybrid atau online untuk menjangkau mahasiswa yang memiliki jarak jauh. berinvestasi pada

media dan teknologi pembelajaran yang lebih modern dan baik, peningkatan pelayanan prima kepada para mahasiswa, kolaborasi industri dalam tridharma, dan lainnya. Strategi diversifikasi tersebut perlu untuk dilakukan agar meningkatkan pertumbuhan, memitigasi risiko dan meningkatkan daya saing Polines.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Polines

Arah dalam peningkatan, pengembangan, dan penguatan pendidikan tinggi terapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta kondisi, aspirasi masyarakat dan perkembangan industri, maka dalam rangka pemantapan eksistensi sebagai perguruan tinggi terapan, Politeknik Negeri Semarang menetapkan visi sebagai berikut:

“Polines Menjadi Perguruan Tinggi Terapan yang Diakui secara Nasional dan Internasional, mampu Bersaing, Akuntabel, Berkarakter, dan Beretika dalam Bidang Teknologi dan Bisnis”

Visi Polines mendukung Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

Rumusan visi Polines mengandung makna kunci:

1. *Perguruan Tinggi Terapan*; menegaskan bahwa Polines, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, merupakan perguruan tinggi vokasi, yang menyelenggarakan Tri Dharma dalam pengembangan penalaran, keahlian terapan (applied knowledge, technology transfer, economic development), serta penyelesaian masalah (problem solving) bagi pemangku kepentingan (stakeholders) berupa relevan, responsif, dan adaptif dengan kebutuhan dan perkembangan industri, memenuhi tuntutan global, bernilai tambah, mendukung efisiensi dan efektivitas kehidupan. Polines diharapkan tidak hanya sebagai mediator applied knowledge dan technology transfer tetapi juga sebagai mediator economic development dalam memperkuat kekuatan ekonomi nasional dan daya saing global;
2. *Diakui (Nasional dan Internasional) dan Bersaing*; menyatakan bahwa tata kelola penyelenggaraan pendidikan harus terakreditasi, unggul, baik nasional maupun internasional, serta kualifikasi lulusan yang unggul, mampu merespon, beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta relevan dengan dinamika kebutuhan pemangku kepentingan (industri,

dunia usaha, masyarakat nasional dan internasional) dengan berkomitmen pada kualitas yang dinamis;

3. *Akuntabel*; dimaknai sebagai tanggung jawab penyelenggaraan kepada masyarakat, mahasiswa, orang tua, dosen, manajemen, dan pemerintah, yang mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang antara lain berupa: implementasi jaminan mutu, transparan, audit secara berkala dan perolehan nilai akuntabilitas kinerja institusi;
4. *Karakter dan Etika*; menguraikan pentingnya nilai untuk membangun semangat kerja, etos kerja, sikap kerja, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, cara berkomunikasi, menghargai orang lain, serta kepedulian sosial. Hal tersebut diikuti dengan etika sebagai aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya yang terbuka, menghargai keberagaman dengan kesantunan, kepedulian dan empati pada orang lain.

2.2 Misi Polines

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, misi Polines adalah:

1. Mewujudkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri di bidang Teknologi dan Bisnis;
2. Mewujudkan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terapan yang berorientasi pada Inovasi Teknologi dan Bisnis untuk penyelesaian permasalahan di Industri dan masyarakat;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, terampil, beretika dan berdaya saing;
4. Mewujudkan sistem tata kelola pendidikan tinggi vokasi yang transparan dan akuntabel; dan
5. Membangun sinergi kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

2.3 Tujuan Polines

Semangat mewujudkan visi dan misi memerlukan tujuan yang jelas agar tujuan pengembangan, peningkatan kapasitas dan penguatan program serta kegiatan menjadi terarah. Tujuan ini menjadi outcome dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Polines, dengan rumusan berikut.

1. Terwujudnya sistem pendidikan tinggi vokasi berbasis pada outcome yang selaras dengan kebutuhan industri di bidang Teknologi dan Bisnis;
2. Terwujudnya Penelitian dan Pengabdian masyarakat terapan yang berorientasi pada kemandirian bidang Inovasi Teknologi Internet of Things dan Energi Baru Terbarukan dan Bisnis berbasis digital untuk penyelesaian permasalahan di Industri dan masyarakat;
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dibidang teknologi dan bisnis yang Unggul, terampil, beretika dan berdaya saing;
4. Terwujudnya sistem tata kelola pendidikan tinggi vokasi yang bertanggungjawab, jujur, efektif dan efisien; dan
5. Menghasilkan kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri yang bersinergi.

2.4 Sasaran Strategis Polines

Polines sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi menetapkan Sasaran strategis dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Direktur Polines dengan Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai penjabaran dari tujuan strategis meliputi:

1. Meningkatnya kualitas kurikulum berbasis pada *outcome* dan pembelajaran vokasi dengan *teaching factory* yang selaras dengan kebutuhan industri di bidang Teknologi dan Bisnis;
2. Meningkatnya kualitas dosen melalui Penelitian dan Pengabdian masyarakat terapan yang berorientasi pada kemandirian bidang Inovasi Teknologi *Internet of Things* dan Energi Baru Terbarukan dan Bisnis berbasis digital untuk penyelesaian permasalahan di Industri dan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas lulusan yang memiliki kompetensi dibidang teknologi dan bisnis yang Unggul, terampil, beretika dan berdaya saing;
4. Meningkatnya sistem tata kelola akademik dan non akademik pendidikan tinggi vokasi yang bertanggungjawab, jujur, efektif dan efisien; dan
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri yang bersinergi

2.5 Indikator Kinerja Utama Polines

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Polines merupakan suatu rangkaian pencapaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sasaran Strategis yang disusun dalam upaya pencapaian Visi Misi Polines perlu dijabarkan dalam Indikator Kinerja yang dapat menetapkan tolak ukur pencapaian Saaran strategis. Indikator Kinerja merupakan target dan acuan utama kinerja bagi Polines dalam pencapaian Sasaran Strategis. Hubungan antara Misi, Sasaran dan Tujuan strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Polines

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja
1	Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi bidang teknologi dan bisnis terapan yang unggul, berkarakter dan beretika	Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan berbasis kompetensi, pengembangan program pembelajaran berbasis project based learning, Program Studi baru serta daya saing ditingkat nasional dan atau internasional.	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dibidang teknologi dan bisnis terapan yang profesional, berkarakter dan beretika dan diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis project based learning,	IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
				IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi
				IKU 1.3	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi
				IKU 1.4	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
				IKT 1.1	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan
				IKT 1.2	Persentase Tingkat Partisipasi mahasiswa pada edukasi formal dan non-formal serta training dalam 12 Bulan
				IKT 1.3	Jenis Beasiswa yang didapatkan peserta didik
2	Melaksanakan dan mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang teknologi dan bisnis	Meningkatnya publikasi karya ilmiah dan karya kreatif-inovatif sivitas akademika.	Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang mampu memberikan kemanfaatan bagi industri dan masyarakat	IKU 2.1	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen
3	Meningkatkan kualitas manajemen institusi, melalui perbaikan berkelanjutan berdasarkan prinsip tata	Meningkatnya kualitas manajemen Perguruan tinggi modern dalam pengelolaan pendidikan dengan tata kelola manajemen	Mewujudkan budaya akademik, organisasi kerja yang sehat dan dinamis dalam upaya memberikan layanan yang bermutu kepada seluruh pemangku kepentingan.	IKU 3.1	Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional.
				IKU 3.2	Jumlah Pendapatan BLU
				IKU 3.3	Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Optimalisasi Aset
				IKU 3.4	Prosentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU.
				IKU 3.5	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU
				IKU 3.6	Predikat SAKIP

	kelola yang baik	institusi yang berkualitas.		IKU 3.7	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
				IKU 3.8	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75
4	Menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berkarakter dan beretika	Meningkatnya sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, professional, berkarakter dan beretika.	Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, professional, berkarakter dan beretika.	IKU 4.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
				IKU 4.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
				IKT 4.1	Dosen Berpendidikan S3
5	Mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya kerja sama yang mendorong kepakaran dan peran dosen terhadap pemangku kepentingan.	Mewujudkan kerja sama guna mendorong kepakaran bidang teknologi dan bisnis yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional	IKU 5.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Polines merupakan turunan dari arah kebijakan dan strategi kementerian pendidikan, kebudayaan Riset dan teknologi dan selaras serta mendukung dengan Visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan kementerian.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi:

1. Transformasi paradigmatik menuju pola pikir *demand-driven*
Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi transformasi paradigmatik menuju pola pikir *demand-driven* sebagai berikut:
 - a. Penguatan Keterhubungan dengan Dunia Kerja:
 - Kurasi Kurikulum: Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Melibatkan sektor swasta dan industri dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum untuk memastikan relevansi.
 - Program Magang dan Praktek: Meningkatkan jumlah dan kualitas program magang dan praktek kerja di industri untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa dan mahasiswa.
 - b. Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi:
 - Pelatihan Berbasis Kompetensi: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja.
 - Pendidikan Berbasis Proyek: Mendorong metode pembelajaran berbasis proyek yang mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi industri.
 - c. Kolaborasi antara Pendidikan dan Industri:

- Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis antara lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi penelitian untuk menciptakan peluang kerja sama dalam riset dan pengembangan.
 - Forum Dialog: Mengadakan forum dialog rutin antara pendidik, pengusaha, dan pembuat kebijakan untuk membahas kebutuhan industri dan tren pasar yang berkembang.
- d. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi:
- Digitalisasi Pendidikan: Mengintegrasikan teknologi digital dalam proses belajar mengajar untuk mempermudah akses ke materi pendidikan yang relevan dan up-to-date.
 - Inovasi dalam Pembelajaran: Mengadopsi metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis simulasi dan pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan keterlibatan dan keterampilan.
- e. Penilaian dan Evaluasi Berbasis Kinerja:
- Evaluasi Berbasis Kinerja: Mengimplementasikan sistem evaluasi yang mengukur keterampilan dan kemampuan siswa berdasarkan hasil kerja nyata dan kontribusi di dunia nyata.
 - Feedback dari Industri: Mengumpulkan umpan balik dari industri tentang kesiapan dan kualitas lulusan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
- f. Fokus pada Kewirausahaan dan Inovasi:
- Pendidikan Kewirausahaan: Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk kewirausahaan dan inovasi agar siswa dan mahasiswa dapat memulai usaha mereka sendiri atau berkontribusi pada startup.
 - Inkubator dan Akselerator: Mendukung inkubator dan akselerator untuk memfasilitasi pengembangan ide-ide inovatif dari mahasiswa dan peneliti.
- g. Perubahan Kebijakan dan Regulasi:
- Reformasi Kebijakan: Mengkaji dan mereformasi kebijakan pendidikan dan riset untuk mendukung fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar.
 - Insentif untuk Adaptasi: Memberikan insentif kepada lembaga pendidikan dan industri untuk beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan *demand-driven*.
2. Penguatan sinergitas pendidikan vokasi dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang berkinerja tinggi
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memperkuat sinergitas dalam pendidikan vokasi dan menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang berkinerja tinggi. Berikut adalah beberapa arahan dan kebijakan kunci yang umumnya terkait dengan penguatan sinergitas tersebut:
- a. Kolaborasi dengan Industri: Kemendikbudristek mendorong pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dengan

kebutuhan industri. Ini termasuk kerjasama langsung dengan perusahaan dan sektor industri untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan vokasi sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

- b. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi: Program peningkatan kualitas tenaga pendidik, infrastruktur, dan fasilitas pendidikan vokasi menjadi fokus utama. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa para siswa mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan praktik terbaik di industri.
- c. Program Magang dan Sertifikasi: Peningkatan program magang dan sertifikasi bagi siswa vokasi untuk memberikan mereka pengalaman kerja langsung dan keterampilan yang diakui industri. Program ini juga mencakup kolaborasi dengan lembaga sertifikasi profesional untuk memastikan relevansi sertifikasi yang diberikan.
- d. Penguatan Lembaga Pendidikan Vokasi: Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga pendidikan vokasi melalui penyediaan dukungan finansial, pelatihan, dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kinerja dan daya saing mereka.
- e. Pengembangan Jaringan Kerjasama: Memfasilitasi pembentukan dan penguatan jaringan antara lembaga pendidikan vokasi, industri, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini meliputi forum-forum diskusi, seminar, dan kegiatan lain yang memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi.
- f. Pendekatan Berbasis Proyek: Mendorong pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan kerjasama dengan industri untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan yang lebih aplikatif dan siap pakai.
- g. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan vokasi untuk meningkatkan kompetensi mereka dan relevansi pengajaran.
- h. Penerapan Teknologi: Mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar-mengajar serta dalam manajemen pendidikan vokasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- i. Pengukuran dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap program pendidikan vokasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap kesiapan kerja dan pencapaian hasil pendidikan.

Dengan kebijakan-kebijakan ini, Kemendikbudristek bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan vokasi yang lebih terhubung dengan dunia industri, serta memastikan bahwa lulusan vokasi siap untuk memenuhi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang.

3. Penguatan stok kecakapan yang relevan dengan tren industri masa depan. Kebijakan Kemendikbudristek terkait penguatan stok kecakapan yang relevan dengan tren industri masa depan berfokus pada adaptasi dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan vokasi untuk memastikan lulusan siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Beberapa kebijakan kunci yang sering diterapkan untuk mencapai tujuan ini meliputi:

- a. Pembaruan Kurikulum: Menyesuaikan kurikulum pendidikan tinggi dan vokasi agar relevan dengan perkembangan teknologi dan tren industri terbaru. Kurikulum perlu di-update secara berkala untuk mencakup keterampilan dan pengetahuan baru yang diperlukan di pasar tenaga kerja masa depan, seperti keterampilan digital, analitik data, dan kecerdasan buatan.
- b. Kolaborasi dengan Industri: Meningkatkan kerja sama antara perguruan tinggi dan industri untuk memastikan bahwa program pendidikan mencakup keterampilan yang dicari oleh pemberi kerja. Kemendikbudristek mendorong pembentukan kemitraan strategis yang memungkinkan perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam pengembangan kurikulum, penyelenggaraan magang, dan penelitian terapan.
- c. Pendidikan Berbasis Kompetensi: Mengimplementasikan pendekatan berbasis kompetensi dalam pendidikan tinggi dan vokasi, yang fokus pada penguasaan keterampilan praktis dan hasil belajar yang konkret. Ini termasuk program sertifikasi dan pelatihan yang sesuai dengan standar industri.
- d. Pengembangan Kurikulum Inovatif: Mendorong pengembangan kurikulum inovatif yang mencakup pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan simulasi yang mencerminkan tantangan dan situasi dunia nyata. Ini membantu mahasiswa untuk lebih siap menghadapi kompleksitas dan dinamika industri masa depan.
- e. Peningkatan Keterampilan Digital dan Teknologi: Memperkuat fokus pada keterampilan digital dan teknologi, seperti pemrograman, analitik data, dan keamanan siber, untuk memastikan lulusan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi digital.
- f. Pendidikan Berkelanjutan dan Pengembangan Profesional: Menyediakan peluang untuk pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan profesional bagi lulusan dan tenaga kerja yang sudah ada. Ini termasuk kursus lanjutan, pelatihan, dan sertifikasi untuk memastikan keterampilan tetap relevan dengan perkembangan industri.
- g. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan: Mengintegrasikan teknologi pendidikan dalam proses belajar-mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pendidikan. Misalnya, menggunakan platform e-learning, simulasi virtual, dan alat pembelajaran interaktif.
- h. Riset dan Pengembangan: Mendorong penelitian dan pengembangan yang berfokus pada solusi dan inovasi yang relevan dengan tren industri masa depan. Ini termasuk mendukung proyek-proyek penelitian yang dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru yang bermanfaat untuk industri.
- i. Pendekatan Multi-Stakeholder: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan industri.
- j. Evaluasi dan Akreditasi: Mengembangkan sistem evaluasi dan akreditasi yang memastikan program pendidikan memenuhi standar kualitas dan relevansi dengan kebutuhan industri. Evaluasi berkala membantu

menjaga agar pendidikan tetap selaras dengan perkembangan terbaru di dunia kerja.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, Kemendikbudristek berusaha untuk membangun ekosistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan cepat dalam industri dan teknologi, sehingga lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan masa depan.

4. Penguatan pendidikan profesional dan kewirausahaan.

Kebijakan Kemendikbudristekdikti (sekarang Kemendikbudristek) terkait penguatan pendidikan profesional dan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan ekonomi. Berikut adalah beberapa kebijakan kunci yang sering diterapkan untuk penguatan di bidang ini:

a. Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan

- Integrasi Kewirausahaan dalam Kurikulum: Mendorong integrasi materi kewirausahaan ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan tinggi dan vokasi. Ini termasuk penambahan mata kuliah kewirausahaan, studi kasus bisnis, dan modul tentang inovasi dan manajemen usaha.
- Program Pendidikan Profesional: Mengembangkan program pendidikan profesional yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial yang relevan dengan industri. Ini termasuk pelatihan praktis, sertifikasi profesional, dan kursus lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

b. Kemitraan dengan Industri dan Dunia Usaha

- Kolaborasi dengan Dunia Usaha: Meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan vokasi, dan dunia usaha untuk menciptakan program yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini bisa mencakup pengembangan kurikulum bersama, program magang, dan proyek-proyek penelitian terapan.
- Dukungan untuk Inkubator Bisnis dan Startups: Mendorong pendirian inkubator bisnis dan pusat inovasi di perguruan tinggi yang mendukung mahasiswa dan lulusan dalam mengembangkan ide bisnis, serta menyediakan akses ke mentor, sumber daya, dan jaringan profesional.

c. Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan

- Pelatihan Kewirausahaan: Menyediakan pelatihan dan workshop tentang kewirausahaan yang mencakup topik seperti perencanaan bisnis, pemasaran, keuangan, dan manajemen. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga kewirausahaan dan mentor dari sektor industri.
- Program Mentoring: Mengimplementasikan program mentoring yang menghubungkan mahasiswa dan lulusan dengan pengusaha berpengalaman yang dapat memberikan bimbingan dan nasihat dalam mengembangkan usaha mereka.

d. Pendanaan dan Sumber Daya

- Skema Pembiayaan untuk Kewirausahaan: Menyediakan akses ke dana dan hibah bagi mahasiswa dan lulusan yang ingin memulai usaha. Ini bisa berupa kompetisi bisnis dengan hadiah modal, serta kemudahan akses ke pinjaman dan investasi.
 - Dukungan Infrastruktur: Menyediakan fasilitas dan sumber daya seperti ruang kerja bersama, laboratorium, dan alat teknologi yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan dan inovasi.
- e. Penelitian dan Inovasi
- Dukungan untuk Riset Inovatif: Mendukung penelitian dan pengembangan yang berfokus pada inovasi dan kewirausahaan. Ini termasuk memberikan dana riset untuk proyek-proyek yang memiliki potensi komersial dan mendorong kerjasama antara akademisi dan industri.
 - Kompetisi Inovasi: Mengadakan kompetisi dan pameran inovasi yang mendorong mahasiswa dan peneliti untuk mempresentasikan ide dan solusi baru yang dapat diaplikasikan dalam dunia usaha.
- f. Evaluasi dan Peningkatan Kualitas
- Evaluasi Program Kewirausahaan: Melakukan evaluasi berkala terhadap program kewirausahaan dan profesional untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan keterampilan dan memfasilitasi perkembangan bisnis.
 - Standar Akreditasi: Mengembangkan standar akreditasi untuk program kewirausahaan dan pendidikan profesional agar kualitas dan relevansi program dapat terjaga.
- g. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
- Pelatihan Tenaga Pengajar: Memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga pengajar dalam hal kewirausahaan dan pendidikan profesional agar mereka dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif dan relevan.
 - Pengembangan Kompetensi Pendidik: Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di bidang kewirausahaan dan profesional melalui pelatihan, seminar, dan workshop untuk memastikan mereka tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru di industri.

Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, Kemendikbudristek bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan lulusan dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan kemampuan kewirausahaan yang diperlukan untuk berinovasi dan bersaing dalam ekonomi global.

5. Pengembangan vokasi sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia terkait pengembangan vokasi sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja serta menyesuaikan

pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kebijakan ini:

- a. Pendidikan Vokasi yang Relevan: Kemendikbudristek berupaya memastikan bahwa program vokasi di berbagai lembaga pendidikan, seperti SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan politeknik, relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri. Ini termasuk memperbarui kurikulum secara berkala dan melibatkan dunia usaha dalam proses penyusunan kurikulum.
- b. Kemitraan dengan Dunia Industri: Pemerintah mendorong kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi dan industri untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan sesuai dengan standar industri. Ini juga termasuk penyediaan fasilitas praktik kerja yang relevan dan program magang.
- c. Pendidikan Berbasis Kompetensi: Program vokasi difokuskan pada pengembangan kompetensi praktis yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Pembelajaran seringkali melibatkan keterampilan teknis dan soft skills yang diperlukan dalam industri tertentu.
- d. Peningkatan Kualitas Pengajaran: Kemendikbudristek mendukung pelatihan dan peningkatan kualitas pengajaran bagi tenaga pendidik di bidang vokasi. Ini termasuk pengembangan keterampilan instruktur agar mereka dapat mengajarkan keterampilan terbaru dan relevan dengan kebutuhan industri.
- e. Pengembangan Pembelajaran Sepanjang Hayat: Kebijakan ini mendukung ide bahwa pembelajaran tidak berhenti pada pendidikan formal. Pemerintah mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan keterampilan mereka melalui pelatihan lanjutan, kursus, dan sertifikasi profesional. Ini penting dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika pasar kerja.
- f. Akses dan Kesetaraan: Kemendikbudristek berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan vokasi bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan daerah terpencil. Ini termasuk dukungan untuk beasiswa, pelatihan, dan program khusus yang dapat membantu mereka mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan.
- g. Inovasi dalam Pendidikan Vokasi: Pemerintah mendukung inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran vokasi, seperti penggunaan teknologi digital, pembelajaran berbasis proyek, dan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif.

Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja, serta memfasilitasi proses pembelajaran yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

6. Penciptaan institusi yang lebih otonom.

Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penciptaan institusi yang lebih otonom merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan akuntabilitas di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Beberapa aspek penting dari kebijakan ini meliputi:

- a. Otonomi Akademik dan Manajerial: Kemendikbudristek memberikan lebih banyak otonomi kepada perguruan tinggi untuk mengelola program

akademik, kurikulum, dan manajemen sumber daya. Ini bertujuan untuk memungkinkan institusi pendidikan tinggi membuat keputusan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Peningkatan Kualitas dan Akreditasi: Perguruan tinggi yang diberikan otonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Kemendikbudristek melakukan evaluasi dan akreditasi untuk memastikan bahwa institusi yang lebih otonom tetap memenuhi standar kualitas yang tinggi.
- c. Kebijakan Pendanaan: Institusi pendidikan yang lebih otonom mungkin memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan dana. Kebijakan ini dapat mencakup penyesuaian dalam alokasi dana, penggalangan dana sendiri, dan manajemen anggaran yang lebih transparan.
- d. Inovasi dan Pengembangan Kurikulum: Dengan otonomi yang lebih besar, perguruan tinggi dapat lebih bebas untuk mengembangkan kurikulum yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan industri serta tren global. Ini termasuk pengembangan program-program baru yang tidak hanya mengikuti kurikulum standar, tetapi juga berfokus pada keunggulan akademik dan profesional.
- e. Tata Kelola dan Akuntabilitas: Meskipun diberikan otonomi, perguruan tinggi tetap harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemerintah dan publik. Ini melibatkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya serta pencapaian hasil pendidikan.
- f. Desentralisasi Pengambilan Keputusan: Kebijakan ini mendukung desentralisasi pengambilan keputusan, memungkinkan universitas dan institut pendidikan untuk membuat keputusan strategis secara mandiri, seperti dalam hal pengembangan riset, kemitraan internasional, dan inovasi dalam pembelajaran.
- g. Pemberdayaan dan Kemandirian: Perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dalam hal pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kegiatan akademik dan non-akademik. Ini termasuk peningkatan kapasitas untuk menarik dan mempertahankan staf pengajar berkualitas serta meningkatkan fasilitas pendidikan.
- h. Pengelolaan dan Kerjasama Internasional: Institusi yang lebih otonom dapat lebih aktif dalam menjalin kerjasama internasional, baik dalam hal program pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, maupun pengembangan jaringan akademik global.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan, mendorong inovasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Semarang

Arah kebijakan dan strategi Politeknik Negeri Semarang mengacu pada arah dan kebijakan kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu, arah dan kebijakan juga diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja antara direktur dengan Kemendikbudristek, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Instrumen Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan LAM. Arah kebijakan dan strategi Polines dirumuskan untuk dapat mendukung tercapainya Tiga unsur utama Perguruan Tinggi Vokasi yaitu a) Kualitas lulusan, b) Kualitas dosen, dan c) Pengembangan Kurikulum berbasis Outcome based Education. Untuk mencapai unsur utama tersebut memerlukan pendekatan strategis yang memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia secara efektif. Secara Umum Strategi Polines dibagi dalam beberapa hal seperti optimalisasi Sumber Daya Manusia dengan pengembangan dan pelatihan sesuai kompetensi, rekrutmen strategis, dosen industri untuk kuliah tamu dan yang terakhir melakukan evaluasi kinerja untuk memastikan peningkatan kualitas pengajaran dan kepuasan mahasiswa. Selain optimalisasi SDM Kurikulum yang memperhatikan perkembangan teknologi industri serta permasalahan industri mutlak diperlukan, melalui OBE dan TEfa dapat menjadi jembatan penghubung gap antara dunia pendidikan dengan industri. penelitian dan pengabdian juga diperlukan untuk mendorong inovasi dan implementasi ke masyarakat yang di masa depan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan integrasi dalam pendidikan. Tata kelola yang optimal dapat mendorong peningkatan layanan kepada stakeholders yang dapat meningkatkan kemungkinan kerjasama yang baik untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian. hal ini akan berdampak besar pada polines di masa yang akan datang. lebih jauh, kebijakan dan strategi Polines dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Polines

Kebijakan	Strategi
<p>1. Kebijakan kurikulum berbasis pada outcome dan pembelajaran vokasi dengan teaching factory yang selaras dengan kebutuhan industri di bidang Teknologi dan Bisnis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan penyesuaian kurikulum berbasis OBE agar relevan dengan perkembangan teknologi dan tren industri terbaru untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan Polines sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar tenaga kerja. 2. Kurikulum di-update bersama dengan industri secara berkala untuk mencakup keterampilan dan pengetahuan baru yang diperlukan di pasar tenaga kerja masa depan, seperti keterampilan digital, analitik data, dan kecerdasan buatan. 3. Pengembangan kurikulum inovatif yang mencakup pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan simulasi yang mencerminkan tantangan dan situasi dunia nyata. Ini membantu mahasiswa untuk lebih siap menghadapi kompleksitas dan dinamika industri masa depan. 4. Meningkatkan jumlah dan kualitas program magang di industri untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa
<p>2. Kebijakan kualitas dosen melalui Penelitian dan Pengabdian masyarakat terapan yang berorientasi pada kemandirian bidang Inovasi Teknologi Internet of Things dan Energi Baru Terbarukan dan Bisnis berbasis digital untuk penyelesaian permasalahan di Industri dan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah luaran penelitian dan pengabdian yang mendapatkan rekognisi dengan kolaborasi penelitian dan pengabdian dengan melibatkan mahasiswa, 2. Peningkatan sitasi karya ilmiah dengan publikasi Tugas akhir, Skripsi atau tesis mahasiswa dengan memanfaatkan Jurnal Polines yang terindeks nasional. 3. Peningkatan kualitas kualifikasi dosen dengan pendampingan dan percepatan jabatan Lektor

Kebijakan	Strategi
	<p>Kepala dan mendorong studi lanjut S3 melalui beasiswa luar negeri maupun melalui perguruan tinggi penyedia studi lanjut S3 yang diikat dengan perjanjian kerjasama dengan Polines.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan kualitas dosen melalui Dosen yang menjadi Praktisi di Industri, keanggotaan dosen pada organisasi profesi, atau berkegiatan di luar kampus, dan adanya dosen asing 5. Pengembangan Kompetensi dosen di bidang kewirausahaan dan profesional melalui pelatihan, sertifikasi, seminar, dan workshop agar dapat memberikan materi lebih efektif dan relevan dan memastikan dosen tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru di industri. 6. Mendukung penelitian dan pengembangan yang berfokus pada inovasi dan kewirausahaan. Ini termasuk memberikan dana riset untuk proyek-proyek yang memiliki potensi komersial dan mendorong kerjasama antara akademisi dan industri.
<ol style="list-style-type: none"> 3. Kebijakan lulusan yang memiliki kompetensi dibidang teknologi dan bisnis yang Unggul, terampil, beretika dan berdaya saing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen mahasiswa berprestasi akademis dan non akademis serta pembimbing oleh dosen kepada mahasiswa berprestasi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa/lulusan. 2. Mendorong adanya mahasiswa asing inbound dengan adanya kelas internasional pada prodi terakreditasi internasional, atau melalui jalur kerjasama dengan perguruan tinggi dari negara lain yang diikat dengan perjanjian kerjasama 3. Menyediakan kursus lanjutan, pelatihan, dan sertifikasi untuk pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan profesional bagi lulusan 4. Penguatan inkubator bisnis dan pusat inovasi di perguruan tinggi yang mendukung mahasiswa dan lulusan 5. Menyediakan pelatihan dan workshop tentang kewirausahaan yang mencakup topik seperti perencanaan bisnis, pemasaran, keuangan, dan manajemen. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga kewirausahaan dan mentor dari sektor industri. 6. Mengimplementasikan program mentoring yang menghubungkan mahasiswa dan lulusan dengan pengusaha berpengalaman yang dapat memberikan bimbingan dan nasihat dalam mengembangkan usaha mereka.

Kebijakan	Strategi
<p>4. Kebijakan Sistem tata kelola akademik dan non akademik pendidikan tinggi vokasi yang bertanggungjawab, jujur, efektif dan efisien</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan layanan BLU dengan Modernisasi proses bisnis layanan BLU berbasis teknologi informasi yang terintegrasi 2. Internasionalisasi Polines dengan Fasilitasi Program Studi untuk akreditasi Internasional yang diakui Pemerintah, pelaksanaan kelas internasional, dan Peningkatan kerjasama internasional 3. Peningkatan tata kelola dan manajemen keuangan dengan Mengurangi deviasi antara perencanaan dengan realisasi program, peningkatan pendapatan BLU, efisiensi biaya operasional, diversifikasi sumber pendapatan BLU, diversifikasi layanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan sumber pendapatan BLU, dan Peningkatan kualitas perencanaan pendapatan 4. Implementasikan sistem penjaminan mutu internal yang berkualitas dengan mengadopsi siklus PPEPP secara berkala pada setiap pusat layanan. 5. membuat keputusan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian dengan melakukan evaluasi dan akreditasi untuk memastikan bahwa institusi yang lebih otonom tetap memenuhi standar kualitas yang tinggi. 7. Peningkatan dalam pengelolaan alokasi dana, penggalangan dana sendiri, dan manajemen anggaran yang lebih transparan. 8. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan sumber daya serta pencapaian hasil pendidikan 9. Peningkatan Branding dan perbaikan sarana dan prasarana serta layanan Polines kepada stakeholders untuk meningkatkan jumlah pendaftar 10. Penguatan pengambilan keputusan strategis secara mandiri, seperti dalam hal pengembangan riset, kemitraan internasional, dan inovasi dalam pembelajaran. 11. meningkatkan kemandirian dalam hal pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kegiatan akademik dan non-akademik. 12. Peningkatan kualitas sarpras pendukung pembelajaran berbasis Teaching Factory dengan Prodi/laboratorium/bengkel/studio yang terakreditasi 13. Peningkatan luas lahan dan bangunan kampus melalui rencana kampus kedua Polines melalui kerjasama dan hibah Teaching Factory
<p>5. Kebijakan Kualitas dan kuantitas kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri yang bersinergi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat otonomi dan keaktifan dalam menjalin kerjasama Nasional/Internasional, baik dalam hal program pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, maupun pengembangan jaringan akademik global. 2. Membangun kemitraan strategis antara lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi penelitian

Kebijakan	Strategi
	<p>untuk menciptakan peluang kerja sama dalam riset dan pengembangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penguatan jaringan antara lembaga pendidikan vokasi, industri, dan pihak-pihak terkait lainnya. 4. Mengadakan forum dialog rutin antara pendidik, pengusaha, dan pembuat kebijakan untuk membahas kebutuhan industri dan tren pasar yang berkembang. 5. Peningkatan kerjasama industri yang berkelanjutan yang berfokus pada usaha untuk menciptakan program yang relevan dengan kebutuhan industri. 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas tindak lanjut kerjasama baik nasional maupun internasional, baik dalam hal program pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, maupun pengembangan jaringan akademik global. 7. Pengelolaan dan Kerjasama Internasional: Institusi yang lebih otonom dapat lebih aktif dalam menjalin kerjasama internasional, baik dalam hal program pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, maupun pengembangan jaringan akademik global. 8. Pemerintah mendorong kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi dan industri untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan sesuai dengan standar industri. Ini juga termasuk penyediaan fasilitas praktik kerja yang relevan dan program magang. 9. Meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan vokasi, dan dunia usaha untuk menciptakan program yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini bisa mencakup pengembangan kurikulum bersama, program magang, dan proyek-proyek penelitian terapan. 10. Dukungan untuk Inkubator Bisnis dan Startups: Mendorong pendirian inkubator bisnis dan pusat inovasi di perguruan tinggi yang mendukung mahasiswa dan lulusan dalam mengembangkan ide bisnis, serta menyediakan akses ke mentor, sumber daya, dan jaringan profesional. 11. Pendekatan Multi-Stakeholder: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan sesuai dengan

Kebijakan	Strategi
	kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan industri.

3.2 Kerangka Regulasi

Polines berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.175/O/1997 tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang. Politeknik yang dahulu bernama Politeknik Universitas Diponegoro (Politeknik Undip) berubah nama menjadi Politeknik Negeri Semarang. Keputusan tersebut disusul dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 311/O/1998 tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang.

Organisasi Polines berubah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 260/O/2024 tentang Perincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang. Keputusan Menteri tersebut menetapkan dan menguraikan kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi dan tata kerja Polines sesuai dengan struktur organisasi. Dengan terbitnya SK penetapan Politeknik Negeri Semarang (Polines) menjadi perguruan tinggi negeri dengan status Pola Pengelolaan Keuangan (PPK BLU) dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/KMK.05/2021 tertanggal 7 Juni 2021 yang menyatakan perubahan status dari PT satuan kerja menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan status PPK Badan Layanan Umum.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005, pasal 31 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa dalam hal instansi pemerintah perlu mengubah status kelembagaannya untuk menerapkan PPK BLU, perubahan struktur kelembagaan dari instansi pemerintah tersebut berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tersebut, maka struktur organisasi Polines sebagai PPK-BLU dapat dilihat pada Gambar 3.1.

3.3 Kerangka Kelembagaan, Tugas dan Fungsi Polines

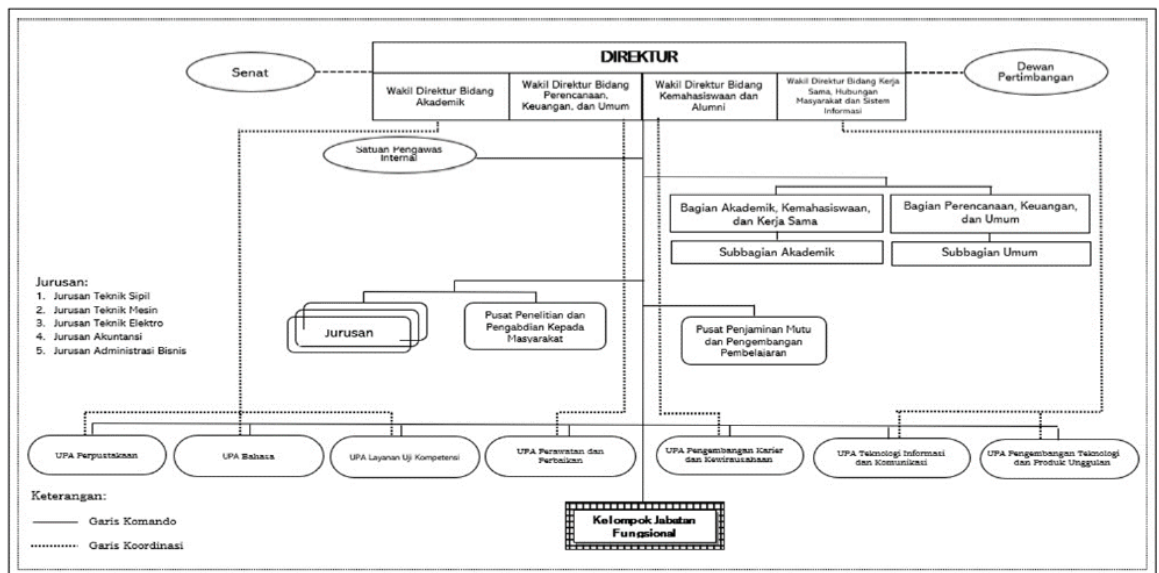
3.3.1 Tugas Polines

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menetapkan Polines sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang menyiapkan mahasiswa dengan keahlian terapan tertentu pada jenjang Diploma sampai Program Sarjana Terapan. Penyelenggaraan pendidikan ini dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai pada Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175/O/1997, tanggal 16 Agustus 1997, Tentang Pendirian Politeknik, pemerintah memberi peluang Polines menyelenggarakan jenjang pendidikan tersebut. Hingga saat ini Polines telah menyelenggarakan pendidikan Program Diploma, Program Sarjana Terapan, Program Pendidikan Profesi, dan Program Magister Terapan yang kedepannya dan secepatnya dapat dilanjutkan sampai Program Doktor Terapan.

3.3.2 Fungsi Organisasi Polines

Sebelum penerapan PPK-BLU, tata kelola Polines mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Statuta Polines, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polines. Kemudian, Seiring dengan penerapan PPK-BLU, Polines akan mengembangkan struktur organisasi dan tata kelola yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 260/O/2024 tentang Perincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang. Struktur Organisasi Polines setelah penerapan PPK-BLU dapat dilihat seperti Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang

Tugas pokok dan fungsi dari organisasi Polines sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2023 adalah sebagai Berikut:

Tabel 3.2 Penjelasan tugas dan fungsi dari organ Polines

Organ Polines	Tugas dan Fungsi
Dewan Pertimbangan	1. Menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Polines.

Organ Polines	Tugas dan Fungsi
	2. Menyusun rencana, program, dan anggaran Dewan Pertimbangan.
Senat	Menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap norma akademik dan kode etik sivitas akademika; penerapan ketentuan akademik; pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi; dll.
Direktur	Menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polines (Permendikbud Nomor 72 Tahun 2014) tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang. Direktur menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan pelaksanaan kegiatan layanan administratif.
Wakil Direktur Bidang Akademik	Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan	Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
Wakil Direktur Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi.	Membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama, hubungan masyarakat, dan sistem informasi.
Bagian	Menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Polines. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian terdiri atas Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama dan Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum
Jurusan	Melaksanakan Pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. Jurusan Terdiri dari Jurusan Teknik Sipil; Jurusan Teknik Mesin; Jurusan Teknik Elektro; Jurusan Akuntansi; dan Jurusan Administrasi Bisnis.
Pusat	Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan pengembangan pembelajaran. Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. Pusat yang ada di Politeknik Negeri Semarang yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP).
Satuan Pengawasan Internal	1. Menyusun rencana, program, dan anggaran Satuan Pengawasan Internal. 2. Melaksanakan pengembangan dan penjaminan sistem pengawasan non akademik.

Organ Polines	Tugas dan Fungsi
	3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan mengevaluasi non akademik.
Dewan Pengawas	Melakukan pembinaan teknis dan keuangan terhadap pengelolaan BLU. Dewan Pengawas untuk BLU Polines berkewajiban: 1) menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis; 2) memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan; 3) menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA; dll.
Unit Penunjang Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpustakaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan, 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan, 3. Bahasa, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa, 4. Perawatan dan Perbaikan, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana penunjang akademik, 5. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa, 6. Layanan Uji Kompetensi, mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan layanan uji kompetensi, 7. Pengembangan Teknologi dan Produk Unggulan, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi dan produk unggulan.

3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi juga menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi dan melanjutkan Grand Design dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2016-2019, Politeknik Negeri Semarang (Polines) menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Semarang 2020-2024 untuk memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait serta memiliki indikator untuk mengukur capaian Reformasi Birokrasi Polines. Dasar hukum mandat reformasi birokrasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja pemerintahan yaitu Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi Birokrasi meliputi delapan area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan. Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Penguatan Peraturan dan perundangan. Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Penguatan peraturan perundangan diharapkan tercapai melalui meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
3. Penguatan Kelembagaan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Penguatan kelembagaan diharapkan dapat menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal. Selain juga untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
4. Penguatan Tata laksana. Target dari penguatan tata laksana adalah meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government; meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; serta meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.
5. Penguatan Sistem Manajemen SDM. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target penguatan system manajemen SDM adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur; meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur; serta meningkatnya disiplin SDM Aparatur;

6. Penguatan Pengawasan. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target penguatan pengawasan adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang penyimpanan oleh aparatur; serta memperoleh opini WTP
7. Penguatan Akuntabilitas. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Target penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja; serta meningkatnya akuntabilitas aparatur.
8. Penguatan Kualitas. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit organisasi sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target penguatan kualitas layanan public adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih baik, lebih murah); meningkatnya jumlah unit pelayanan yang menerapkan standar pelayanan publik; Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; serta meningkatnya profesionalisme aparatur.

Capaian indikator Reformasi Birokrasi di Politeknik Negeri Semarang (Polines) saat ini, berdasarkan evaluasi tim internal Polines, nilai pembangunan Zona Integritas Polines adalah 76,99. Skor ini masih berada di bawah threshold skor pembangunan zona integritas di lingkungan Kemendikbudristek, tahun 2020 skor 78. Polines mencanangkan program prioritas implementasi Reformasi Birokrasi dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi Polines 2020-2024. Reformasi birokrasi memerlukan pengembangan sistem dan pembaharuan kebijakan-kebijakan untuk mendukung 8 (delapan) area perubahan secara holistik. Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa ada beberapa sistem belum tersedia, baik yang sifatnya perlu perbaikan maupun yang sama sekali belum dimiliki, yaitu: evaluasi SOP mengacu pada peta proses bisnis dengan adanya SOTK batu, Sistem pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi, Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi, Pemberian pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi (dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik), Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi, penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku, Pemutakhiran Data informasi kepegawaian yang dilakukan secara berkala, Sistem Pengendalian Gratifikasi, Sistem Pengendalian Intern, Sistem penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan, Sistem Pengaduan Masyarakat, Wistle Blowing System, Penanganan benturan kepentingan, Sistem Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan SPAN-LAPOR!, Sistem survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, dan database pelayanan yang terintegrasi. Hasil evaluasi eksternal dan internal tersebut menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi di Polines 2020-2024

3.4.1 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi Polines

Saat ini Polines telah memiliki tim Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab dan melaporkan kepada Direktur Polines terkait implementasi dan kemajuan Reformasi birokrasi Polines. Untuk melakukan perbaikan terus menerus, Polines telah

mengalokasikan sumber daya untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi di Polines. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Polines, dengan mengacu pada hasil evaluasi pembangunan Refomasi Birokrasi di Polines, maka prioritas Reformasi Birokrasi di Polines hingga tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir di Tabel 3.1 berikut ini. Prioritas utama tahunan dapat dilihat dari kotak berwarna, yang mengisyaratkan bahwa pada tahun bersangkutan, prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi ada pada elemen elemen area perubahan terkait.

Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi

Bidang Penguatan	2025	2026	2027	2028	2029
1. Manajemen Perubahan					
2. Deregulasi Peraturan					
3. Penguatan Kelembagaan/ Organisasi					
4. Penguatan Tata Laksana					
5. Penguatan Manajemen SDM					
6. Penguatan Akuntabilitas					
7. Penguatan Pengawasan					
8. Penguatan Area Pelayanan Publik					
9. Quick Wins/ Unit Layanan Terpadu Polines					

3.4.2 Target Kinerja Reformasi Birokrasi

Target pembangunan ZI, WBK/WBBM di Polines menggunakan baseline penilaian pembangunan ZI tahun 2020 dengan skor 76,99. Dengan target peningkatan di tahun 2029 menjadi 90.

Tabel 3.4. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Polines 2025-2029

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029

Target indeks RB Polines	77	80	83	85	90
--------------------------	----	----	----	----	----

Reformasi Birokrasi memerlukan sistem pendukung untuk menguatkan 8 area perubahan. Target pembangunan Reformasi Birokrasi Polines dari aspek pengembangan sistem disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.5. Target pembangunan Reformasi Birokrasi Polines

Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi	Ada/ Belum Ada	2015	2016	2017	2018	2019
1. Manajemen Perubahan						
a. Tim RE / ZI	Sudah ada	■	■	■	■	■
b. Roadmap RB/Rencana Pembangunan ZI	Sudah Ada	■	■	■	■	■
c. Pemantauan dan Evaluasi RB / ZI	Belum Ada	■	■	■	■	■
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Belum Ada	■	■	■	■	■
2. Deregulasi Peraturan						
a. Harmonisasi	Belum Dilakukan	■	■	■	■	■
b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/ keputusan	Belum dilakukan	■	■	■	■	■
3. Penguatan Kelembagaan/ Organisasi						
a. Penataan organisasi	Proses peninjauan	■	■	■	■	■
b. Evaluasi kelembagaan	Proses peninjauan	■	■	■	■	■
c. Tindak lanjut evaluasi	Proses peninjauan	■	■	■	■	■

Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi	Ada/ Belum Ada	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
4. Penguatan Tatalaksana						
a. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional	Proses update					
b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Ada (perlu peningkatan)					
c. Keterbukaan Informasi Publik	Perlu peninjauan/ update dan pelaporannya					
5. Penguatan SDM						
a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Ada (update sesuai kebijakan)					
b. Pola Mutasi Internal	Belum Ada					
c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Belum Ada					
d. Penetapan kinerja individu	Ada					
e. Penegakkan aturan disiplin / kode etika / kode perilaku pegawai	Pelu peningkatan					
6. Penguatan Akuntabilitas						
a. Keterlibatan pimpinan	Ada					
b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Ada					
7. Penguatan Pengawasan						
a. Pengendalian Gratifikasi	Belum Ada					

Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi	Ada/ Belum Ada	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
b Penerapan Sisten Pengendalian Intern Pmerintah (SPIP)	Ada (perlu peningkatan)					
c Pengaduan masyarakat	Ada (perlu peningkatan media dan pengelolaannya)					
d Whistle-Blowing System	Belum Ada					
e Penanganan benturan kepentingan	Belum Ada					
8. Penguatan Area Pelayanan Publik						
a Standar pelayanan	Ada (perlu peningkatan)					
b Budaya pelayanan prima	Ada (perlu peningkatan)					
c Pengelolaan pengaduan	Ada(perlu peningkatan)					
d Penilaian keputusan terhadap pelayanan	Belum Ada					
e Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ada(perlu peningkatan)					
9. Quick Wins						
a Unit Layanan Terpadu	Proses Pengembangan					

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Sasaran Strategis

Program-program yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Semarang sebagaimana disebutkan dalam Bab III, akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021. Berikutnya akan dijabarkan sinkronisasi antara indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 4.1. Tabel Sasaran Strategis Polines

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target					
		Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	80	80	80	80	80	80
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	30	30	30	30	35	35
IKU 1.3	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	71	71	72	73	74	75
IKU 1.4	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5	5	5	5	5	5
IKU 2.1	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/	100	100	100	100	100	100

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target					
		Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029
	pemerintah per jumlah dosen						
IKU 3.1	Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional.	54	54	55	55	55	55
IKU 3.2	Jumlah Pendapatan BLU	Rp 69M.	Rp 69M.	Rp 69M.	Rp 69M.	Rp 69M.	Rp 69M.
IKU 3.3	Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Optimalisasi Aset	Rp 1,7M	Rp 1,7M	Rp 1,7M	Rp 1,7M	Rp 1,7M	Rp 1,7M
IKU 3.4	Prosentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU.	110	110	110	120	120	120
IKU 3.6	Predikat SAKIP	A	A	A	A	A	A
IKU 3.7	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	94	94	94	94	94	94
IKU 3.8	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	75	75	75	75	75	75
IKU 4.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	39	39	42	45	48	50
IKU 4.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	81	81	82	83	84	85
IKU 5.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Politeknik Negeri Semarang

Kode	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	80%	81%	82%	83%	84%	85%
IKU 1.1.1	Persentase lulusan Magister Terapan, Profesi, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang berhasil memiliki pekerjaan;		60%	60%	60%	60%	60%
IKU 1.1.2	Persentase lulusan Magister Terapan, Profesi, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang melanjutkan studi		10%	10%	10%	10%	10%
IKU 1.1.3	Persentase lulusan Magister Terapan, Profesi, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang atau menjadi wiraswasta		11%	12%	13%	14%	15%
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	30%	32%	34%	36%	38%	40%
IKU 1.2.1	Persentase mahasiswa Magister Terapan, Profesi, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi		22%	24%	24%	26%	28%
IKU 1.2.2	Persentase mahasiswa Magister Terapan, Profesi, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang meraih prestasi		10%	10%	12%	12%	12%
IKU 1.3	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	71%	73%	75%	77%	79%	81%
IKU 1.3.1	Persentase mata kuliah Magister Terapan, Profesi, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) sebagai bagian dari bobot evaluasi sebagai bagian dari bobot evaluasi		53%	55%	57%	57%	57%
IKU 1.3.2	Persentase mata kuliah Magister Terapan, Profesi, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis project (team-		20%	20%	20%	22%	24%

Kode	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi						
IKU 1.4	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5%	7,5% (2 prodi)	11% (3 prodi)	15% (4 prodi)	19% (5 prodi)	23% (6 prodi)
IKT 1.1	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan	-	95%	95%	95%	97%	97%
IKT 1.2	Persentase Tingkat Partisipasi mahasiswa pada edukasi formal dan non-formal serta training dalam 12 Bulan	-	90%	90%	92%	92%	92%
IKT 1.3	Jenis Beasiswa yang didapatkan peserta didik	-	2	4	5	5	5
IKU 2.1	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 2.1.1	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional per jumlah dosen		5%	5%	5%	5%	5%
IKU 2.1.2	Jumlah keluaran dosen yang berhasil diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen		95%	95%	95%	95%	95%
IKU 3.1	Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	63	65	67	69	71	73
IKU 3.2	Jumlah Pendapatan BLU	Rp 71 M	Rp 72 M	Rp 73 M	Rp 74 M	Rp 75 M	Rp 76 M
IKU 3.3	Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Optimalisasi Aset	Rp 3 M	Rp 3,5 M	Rp 4 M	Rp 4,5 M	Rp 5 M	Rp 5,5 M

Kode	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKU 3.4	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	110%	112%	114%	116%	118%	120%
IKU 3.5	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	3,5	3.75	4	4.25	4.5	5
IKU 3.6	Predikat SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA
IKU 3.7	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	75	77	80	83	85	90
IKU 3.8	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	90%	91%	92%	93%	94%	95%
IKU 4.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	40%	43%	46%	49%	52%	55%
IKU 4.1.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain		30%	33%	33%	36%	36%
IKU 4.1.2	Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri		10%	10%	13%	13%	16%
IKU 4.1.3	Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi		3%	3%	3%	3%	3%
IKU 4.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	81%	82%	83%	84%	85%	86%
IKU 4.2.1	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri		80%	80%	80%	80%	81%

Kode	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
IKU 4.2.2	Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri		2%	3%	4%	5%	5%
IKT 4.1	Dosen Berpendidikan S3	17%	19%	21%	23%	25%	25%
IKU 5.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Negeri vokasi, Polines menerima pendapatan dari beberapa sumber, antara lain adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sumber pendapatan Polines tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari APBN, yaitu pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap tahunnya, disebut dengan Pendapatan Rupiah Murni yang terdiri dari Rupiah Murni Mengikat dan Rupiah Murni Tidak Mengikat;
2. Pendapatan Jasa Layanan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pungutan kepada mahasiswa dengan jenis pungutan:
 - a. Uang Kuliah Tetap/UKT yang dipungut setiap semester;
 - b. Biaya Seleksi Ujian Masuk Politeknik;
 - c. Uang Ujian Tugas Akhir (dipungut satu kali selama studi);
 - d. Biaya Wisuda (dipungut satu kali selama studi);
 - e. Diklatsar MABA (dipungut sekali selama studi);
 - f. Biaya Kelengkapan Mahasiswa Baru (dipungut sekali selama studi);
 - g. Sumbangan Pengembangan Institusi/SPI (dipungut sekali selama studi).
3. Pendapatan Usaha Lainnya, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sama dengan pihak lain; dan
4. Pendapatan Lainnya, yaitu pendapatan yang diperoleh dari sewa ruang kantor, Jasa Lembaga Keuangan (jasa giro/ deposito), Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu.

Dalam melaksanakan operasional kinerjanya, Polines sebagai satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) akan melaksanakan jenis-jenis layanan yang mengarah pada pendapatan BLU untuk membiayai operasional kegiatannya. Jenis-jenis layanan operasional tersebut diproyeksikan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, yaitu:

1. Layanan unit bisnis berbasis akademik, berupa :
 - a. Kerja sama pendidikan dengan industri;
 - b. Pengembangan Paten/HaKI;
 - c. Techno Business Center; dan
 - d. *Book store*.
2. Layanan unit bisnis berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat :
 - a. Kerja sama penelitian; dan
 - b. Kerja sama pengabdian kepada masyarakat/CSR.
3. Layanan unit bisnis berbasis SDM :
 - a. Jasa Konsultasi;
 - b. Training Center; dan
 - c. Uji Kompetensi.
4. Layanan unit bisnis pemberdayaan laboratorium/bengkel/studio :
 - a. Jasa uji laboratorium;
 - b. Jasa broadcasting; dan
 - c. Inkubator bisnis.

5. Layanan unit bisnis berbasis layanan civitas akademika :
 - a. Kantin;
 - b. Percetakan dan penerbitan;
 - c. Teknologi informasi dan internet;
 - d. Jasa klinik kesehatan; dan
 - e. Jasa layanan produk samping.
6. Layanan unit bisnis berbasis layanan tour and travel :
 - a. Jasa perjalanan tour and travel; dan
 - b. *Ticketing*.

Dari uraian di atas, kerangka pendanaan Polines per sasaran tahun 2025 sampai dengan 2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan

(dalam Ribuan Rupiah)

Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	108,004,917	119,695,181	131,385,446	143,075,710	154,765,975
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	7,768,050	8,612,973	9,457,897	10,302,820	11,147,743
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajara	8,438,430	9,285,176	10,131,923	10,978,670	11,825,417
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	14,242,006	15,292,597	16,343,188	17,393,779	18,444,371
Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	73,850,046	75,977,393	78,104,740	80,232,087	82,359,434
Jumlah	212,303,449	228,863,320	245,423,194	261,983,066	278,542,940

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Semarang tahun 2020 – 2024 ini adalah sistem rencana pengembangan jangka menengah (RPJM) dengan rentang waktu lima tahunan dan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pengembangan jangka panjang (RPJP) Politeknik Negeri Semarang Tahun 1982 – 2029. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 – 2024.

Polines menjadi BLU semenjak diterima Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 220/KMK.05/2021, tanggal 7 Juni 2021, tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum). Alasan perubahan ini menyebabkan peninjauan ulang dan dilaksanakan Harmonisasi Renstra Politeknik Negeri Semarang 2020 – 2024 dengan berbagai Peraturan yang muncul kemudian. Harmonisasi ini diwujudkan menjadi Renstra Politeknik Negeri Semarang Perubahan yang menggantikan Renstra tahun 2020-2024 dengan tidak mengubah nama. Penyusunan ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program kerja Politeknik Negeri Semarang dengan kondisi-kondisi perubahan yang terjadi.

Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud diatas, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai perencanaan dan peganggaran tahunan sudah harus diajukan setahun sebelum tahun berjalan, sehingga untuk RKAT tahun 2023 dan 2024 dapat tetap mengacu pada Renstra Politeknik Negeri Semarang ini yang berlaku sampai tahun 2024. Dengan demikian Renstra Politeknik Negeri Semarang tahun 2025-2029 ini dapat menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan program kegiatan universitas dan memastikan, bahwa pada akhir perodesasi dari dokumen renstra bisnis ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Politeknik Negeri Semarang Tahun 2025-2029 dijadikan sebagai landasan oleh Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan Politeknik dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pengembangan empat tahunan dan rencana pengembangan duapuluh tahunan. Berkaitan dengan itu, maka dalam Rencana Strategis Politeknik Negeri

Semarang Tahun 2025-2029 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Direktur dan jajaran pimpinan di tingkat politeknik dan jurusan serta unit-unit di lingkungan Politeknik Negeri Semarang, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Semarang ini dengan penuh tanggung jawab;
2. Direktur dan Wakil Direktur, dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra Politeknik Negeri Semarang Tahun 2025-2029;
3. Untuk menjamin agar *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para Wakil Direktur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Semarang Tahun 2025-2029;
4. Setiap Jurusan dan UPT di lingkungan Politeknik Negeri Semarang berkewajiban untuk menjabarkan Renstra Politeknik Negeri Semarang Tahun 2025-2029 ke dalam dokumen perencanaan masing-masing dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun;
5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Politeknik Negeri Semarang 2025-2029, Direktur dan para Wakil Direktur berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Jurusan dan UPT dalam perumusan rencana kerja masing-masing;
6. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Semarang 2025-2029, Direktur wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik Negeri Semarang;

Dalam hal target capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Semarang ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen Renstra Politeknik Negeri Semarang ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

Lampiran

**DESKRIPSI OPERASIONAL DAN FORMULA PENGHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
Sasaran: Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel					
1	Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional	<p>Definisi: Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari Rupiah Murni APBN.</p> <p>Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun Pendapatan BLU.</p> <p>Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> $\left(\frac{\text{pendapatan BLU}}{\text{biaya operasional}} \right) \times 100\%$ <p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>	%	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)	W D 2

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
2.	Jumlah Pendapatan BLU	<p>Definisi: Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari Rupiah Murni APBN.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> <p style="text-align: center;"><i>Realisasi = yang telah disahkan (SP2B) pada tahun anggaran berjalan</i></p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>	%	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN); SAKTI	W D 2
3.	Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Optimalisasi Aset	<p>Definisi: Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset pada BLU (aset tetap maupun lancar) meliputi pelaksanaan pengelolaan aset BLU dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain dalam bentuk KSO dan KSM, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aset Tetap dan Aset Lainnya = pendapatan dari pendayagunaan aset fisik (gedung, bangunan, peralatan dan mesin) maupun aset lainnya (SDM, paten, HAKI dsb), kecuali pendapatan dari transaksi internal antar unit pada BLU; b. Kerjasama = hasil kerjasama dengan perorangan, badan usaha, pemerintah daerah, maupun instansi pemerintah pusat, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> • Penugasan oleh Kementerian/Lembaga induk; • Kerjasama penelitian yang tidak menghasilkan institutional fee bagi BLU. c. Aset Lancar = <i>return</i> dari aktivitas investasi jangka pendek semisal bunga deposito dan jasa layanan perbankan. d. Pendapatan Unit Usaha = Hasil pendapatan (bruto) yang didapatkan dari kegiatan unit usaha yang dimiliki (rumah sakit, apotek, katering, dsj). <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> <p style="text-align: center;"><i>Realisasi = Pendapatan BLU dari pengelolaan aset</i></p>	%	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN); SAKTI	W D 2 W D 4

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
		<p>Formula Perhitungan Capaian IKU</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>			
4.	<p>Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU.</p>	<p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengukuran tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan serta peningkatan akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan; Penggunaan aplikasi BIOS dalam mendukung proses bisnis BLU sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i> (BIOS) yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i>. <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU</p> $\text{Realisasi} = \text{Jumlah persentase dalam setiap tahapan modernisasi BLU}$ <p>Tahapan dalam modernisasi Pengelolaan BLU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi values maupun logo BLU SPEED pada gedung/bangunan, website, dan media sosial (Bobot 10%) BLU mengisi dan/atau melakukan update data profil, layanan dan keuangan periode 2020-2023 pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu (Bobot 30%) BLU Mempunyai website yang representatif dan up to date (Bobot 15%) Webservice / Integrasi Data (Bobot 15%) Sistem Informasi Manajemen (Bobot 45%) Self Assesment Maturity Rating pada BLU yang dilakukan secara benar dan tepat waktu (Bobot 35%) Formula Perhitungan Capaian IKU <p>Target minimal : 100%</p>	%		W D 4

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC												
		Formula Perhitungan Capaian IKU : $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.															
5.	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU.	Definisi: Akurasi proyeksi pendapatan BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan. Formula Perhitungan Realisasi IKU : Indeks akurasi proyeksi pendapatan memperhitungkan sebagai berikut: a. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%) <table border="1" data-bbox="757 874 1646 1348" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td data-bbox="757 874 898 954">Indeks 5</td> <td data-bbox="898 874 1646 954">Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 954 898 1034">Indeks 4,5</td> <td data-bbox="898 954 1646 1034">Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 1034 898 1114">Indeks 4</td> <td data-bbox="898 1034 1646 1114">Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 1114 898 1193">Indeks 3,5</td> <td data-bbox="898 1114 1646 1193">Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 1193 898 1273">Indeks 3</td> <td data-bbox="898 1193 1646 1273">Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="757 1273 898 1348">Indeks 2,5</td> <td data-bbox="898 1273 1646 1348">Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan</td> </tr> </tbody> </table>	Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan	Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan	Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan	Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan	Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan	Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan	%		W D 2
Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan																
Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan																
Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan																
Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan																
Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan																
Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan																

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC																										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Indeks 2</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 1,5</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 1</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">b. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan (60%)</td> </tr> <tr> <td>Indeks 5</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%</td> </tr> <tr> <td>Indeks 4,5</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%</td> </tr> <tr> <td>Indeks 4</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%</td> </tr> <tr> <td>Indeks 3,5</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%</td> </tr> <tr> <td>Indeks 3</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%</td> </tr> <tr> <td>Indeks 2,5</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%</td> </tr> <tr> <td>Indeks 2</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%</td> </tr> <tr> <td>Indeks 1,5</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%</td> </tr> <tr> <td>Indeks 1</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%</td> </tr> </table> <p>Target Minimal : 3,5</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi IKU :</p>	Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan	Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan	Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan	b. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan (60%)		Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%	Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%	Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%	Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%	Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%	Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%	Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%	Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%	Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%			
Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan																														
Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan																														
Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan																														
b. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan (60%)																															
Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%																														
Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%																														
Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%																														
Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%																														
Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%																														
Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%																														
Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%																														
Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%																														
Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%																														

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
		<p style="text-align: center;">(Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian × 40%) + (Realisasi Indeks Proyeksi Pengesahan × 60%)</p> <p>Formula Perhitungan Capaian IKU :</p> $\left(\frac{\text{realisasi}}{\text{target}}\right) \times 100\% \times \text{bobot IKU (100\%)}$ <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU yang dapat diakui adalah sebesar 150%.</p>			
<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</p>					
6	<p>Kesiapan kerja lulusan:</p> <p>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. 	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria pekerjaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: <ol style="list-style-type: none"> perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; organisasi nirlaba; institusi/organisasi multilateral; lembaga pemerintah; atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/52 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (duabelas) bulan setelah lulus. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: <ol style="list-style-type: none"> pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder), perusahaan; atau pekerja lepas (freelancer). <p>Formula:</p>	%	Tracer Study (Dikti)	W D 3

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
		$\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusarr bekerja dal mendapatkal pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p>			
7	<p>Mahasiswa berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi:</p> <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/ D3/ D2/ D1 yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.. 	<p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah pa-ling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, orgalisasi nirlaba, organisasi mul tilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daera-h terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 	%	PD Dikti	W D 1 W D 3

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
		<p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama- sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait. <p>b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional <p>Formula:</p>			

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
		<p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_1 k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_2 k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_3 k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a_1 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. a_2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal. a_3 = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib. b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).</p>			
<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</p>					
8	<p>Dosen di luar kampus:</p> <p>Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p>	<p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. 	%	Sister dan PD Dikti	W D 1

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
		<p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menj adi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rercangern dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyaralat, dan sebagainya. <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (iima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full tdmel, atau paruh waktu (part time) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri founder)atau pasangan pendtri (co-founder) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) pemsahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (staftup companA) teknologi; atau e) organisasi niriaba nasional dan internasional. 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (founder)atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar. <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p>			

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
		<p>Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi. 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. <p>Formula :</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p>			
9	<p>Kualifikasi dosen/pengajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 	%	Sister dan PD Dikti	W D 1

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
	industri.	<p>Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Menjadi pekerja lepas (freelancer). 4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman: <ol style="list-style-type: none"> a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sangat. <p>Formula :</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi. b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK. z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p>			
10.	Penerapan karya dosen:	<p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 		Sister	W D 4

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
	<p>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p>	<p>1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, 3) ensiklopedia, kamus; 4) studi kasus; dan/atau 5) laporan penelitian untuk mitra.</p> <p>b. Karya terapan, terdiri atas: 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra.</p> <p>c. Karya seni, terdiri atas: 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p>			
<p>Sasaran: Meningkatnya kua-litas kurikulum dan pembelajaran</p>					
11.	<p>Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama program studi S1 dan D4/D3/D2/D1</p>	<p>a. Kriteria kemitraan, perjanjian kerja sama berbentuk: 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;</p>		Sikerma	W D 4

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
		<p>8) menyediakan resource sharing sarana dan prasarana; 9) menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 10) menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau 11) melakukan kemitraan penelitian.</p> <p>b. Kriteria mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi. <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>			
1 2	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based</i>)	<p>a. Kriteria metode pembelajaran. Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>): <ol style="list-style-type: none"> a. mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b. mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau 		PD Dikti	W D 1

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC
	<p>project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p>	<p>c. kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>):</p> <p>a. kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>b. kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c. setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;</p> <p>d. dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau</p> <p>e. kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.</p> <p>3) Kriteria evaluasi</p> <p>a. 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.</p> <p>t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.</p>			
13.	<p>Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui Pemerintah.</p>	<p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi. Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Formula:</p>		PD Dikti	W D 1

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC						
		$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).</p>									
Sasaran: Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri											
14.	Predikat SAKIP	<p>Definisi : Sistem Akuntabilitas adalah sistem yang dirancang untuk membantu penerima amanah dalam mempertanggung jawabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diamanahkan karena setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.</p> <p>Perubahan pola pikir atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja (<i>IT-based</i>)</p> <p>Tujuan penerapan SAKIP adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan. Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggungjawab pada tingkatan unit pelapor. Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja). Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian. <p>Komponen penilaian SAKIP :</p> <table border="1" data-bbox="660 1114 1646 1343"> <thead> <tr> <th data-bbox="660 1114 945 1193">Komponen</th> <th data-bbox="945 1114 1547 1193">Aspek</th> <th data-bbox="1547 1114 1646 1193">Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="660 1193 945 1343">Perencanaan Kinerja</td> <td data-bbox="945 1193 1547 1343"> <ul style="list-style-type: none"> ● Renstra Kementerian ● Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja ● Rencana Kinerja Tahunan (RKT) </td> <td data-bbox="1547 1193 1646 1343">30%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Aspek	Bobot	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ● Renstra Kementerian ● Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja ● Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 	30%			W D 2
Komponen	Aspek	Bobot									
Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ● Renstra Kementerian ● Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja ● Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 	30%									

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC															
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="658 328 943 400"></td> <td data-bbox="943 328 1547 400"> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) </td> <td data-bbox="1547 328 1644 400"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="658 400 943 507">Pengukuran Kinerja</td> <td data-bbox="943 400 1547 507"> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Utama (IKU) • Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja </td> <td data-bbox="1547 400 1644 507">25%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="658 507 943 579">Pelaporan Kinerja</td> <td data-bbox="943 507 1547 579"> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) </td> <td data-bbox="1547 507 1644 579">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="658 579 943 722">Evaluasi Internal</td> <td data-bbox="943 579 1547 722"> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal. • Pemantauan pencapaian kinerja. • Evaluasi program </td> <td data-bbox="1547 579 1644 722">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="658 722 943 914">Capaian Kinerja</td> <td data-bbox="943 722 1547 914"> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target • Keandalan informasi kinerja • Benchmark kinerja dengan instansi lain • Kinerja menurut stakeholder lain </td> <td data-bbox="1547 722 1644 914">20%</td> </tr> </table>		<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) 		Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Utama (IKU) • Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 	25%	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) 	15%	Evaluasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal. • Pemantauan pencapaian kinerja. • Evaluasi program 	10%	Capaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target • Keandalan informasi kinerja • Benchmark kinerja dengan instansi lain • Kinerja menurut stakeholder lain 	20%			
	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) 																			
Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Utama (IKU) • Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 	25%																		
Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) 	15%																		
Evaluasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal. • Pemantauan pencapaian kinerja. • Evaluasi program 	10%																		
Capaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian target • Keandalan informasi kinerja • Benchmark kinerja dengan instansi lain • Kinerja menurut stakeholder lain 	20%																		
15.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Definisi : Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan. Hasil pengendalian dan pemantauan dapat digunakan: a. untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; dan b. sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian kebijakan tahun berjalan Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap : a. Perencanaan anggaran, dengan mengukur : 1) Efektifitas penggunaan anggaran 2) Efisiensi penggunaan anggaran b. Pelaksanaan anggaran. Dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran atas		SAKTI dan SMART	W D 2															

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC																											
		<p>pelaksanaan anggaran digunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; 2) kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran <p>Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Bobot masing-masing aspek dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="660 630 1621 1262"> <thead> <tr> <th data-bbox="660 630 1167 710">Aspek</th> <th data-bbox="1167 630 1458 710">Komponen</th> <th data-bbox="1458 630 1621 710">Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="660 710 1167 790">Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran</td> <td data-bbox="1167 710 1458 790">Revisi DIPA</td> <td data-bbox="1458 710 1621 790">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 790 1167 869"></td> <td data-bbox="1167 790 1458 869">Diviasi Halaman III DIPA</td> <td data-bbox="1458 790 1621 869">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 869 1167 949">kualitas implementasi pelaksanaan anggaran</td> <td data-bbox="1167 869 1458 949">Penyerapan Anggaran</td> <td data-bbox="1458 869 1621 949">20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 949 1167 997"></td> <td data-bbox="1167 949 1458 997">Belanja Kontraktual</td> <td data-bbox="1458 949 1621 997">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 997 1167 1045"></td> <td data-bbox="1167 997 1458 1045">Penyelesaian Tagihan</td> <td data-bbox="1458 997 1621 1045">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1045 1167 1141"></td> <td data-bbox="1167 1045 1458 1141">Pengelolaan UP dan TUP</td> <td data-bbox="1458 1045 1621 1141">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1141 1167 1220"></td> <td data-bbox="1167 1141 1458 1220">Dispensasi SPM</td> <td data-bbox="1458 1141 1621 1220">Pengurang Nilai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="660 1220 1167 1268">kualitas hasil pelaksanaan anggaran</td> <td data-bbox="1167 1220 1458 1268">Capaian Output</td> <td data-bbox="1458 1220 1621 1268">25%</td> </tr> </tbody> </table>	Aspek	Komponen	Bobot	Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	Revisi DIPA	10%		Diviasi Halaman III DIPA	15%	kualitas implementasi pelaksanaan anggaran	Penyerapan Anggaran	20%		Belanja Kontraktual	10%		Penyelesaian Tagihan	10%		Pengelolaan UP dan TUP	10%		Dispensasi SPM	Pengurang Nilai	kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Capaian Output	25%			
Aspek	Komponen	Bobot																														
Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	Revisi DIPA	10%																														
	Diviasi Halaman III DIPA	15%																														
kualitas implementasi pelaksanaan anggaran	Penyerapan Anggaran	20%																														
	Belanja Kontraktual	10%																														
	Penyelesaian Tagihan	10%																														
	Pengelolaan UP dan TUP	10%																														
	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai																														
kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Capaian Output	25%																														

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC																								
16	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	<p>Definisi : Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="660 630 1621 1284"> <thead> <tr> <th>Syarat</th> <th>Menuju WBK</th> <th>Komponen Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai total</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai minimal pengungkit</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bobot nilai minimal per area pengungkit</td> <td>60%</td> <td>Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit</td> </tr> <tr> <td>Nilai komponen hasil "pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal</td> <td>18,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai sub komponen "survey persepsi anti korupsi" minimal</td> <td>15,75 (survey 3,60)</td> <td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30</td> </tr> <tr> <td>Nilai sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal</td> <td>2,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal</td> <td>14,00 (survey 3,20)</td> <td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit :</p>	Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai	Nilai total	75		Nilai minimal pengungkit	40		Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit	Nilai komponen hasil "pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal	18,25		Nilai sub komponen "survey persepsi anti korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30	Nilai sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal	2,5		Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30		SiAZIK	WD 2
Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai																											
Nilai total	75																												
Nilai minimal pengungkit	40																												
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit																											
Nilai komponen hasil "pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal	18,25																												
Nilai sub komponen "survey persepsi anti korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30																											
Nilai sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal	2,5																												
Nilai komponen hasil "Pelayanan publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30																											

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan	Sumber Data	PIC														
		<table border="1" data-bbox="663 352 1453 751"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 352 1323 432">Penilaian</th> <th data-bbox="1323 352 1453 432">Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 432 1323 488">1. Manajemen Perubahan</td> <td data-bbox="1323 432 1453 488">8%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 488 1323 544">2. Penataan Tata Laksana</td> <td data-bbox="1323 488 1453 544">7%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 544 1323 600">3. Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td data-bbox="1323 544 1453 600">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 600 1323 655">4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td data-bbox="1323 600 1453 655">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 655 1323 711">5. Penguatan Pengawasan</td> <td data-bbox="1323 655 1453 711">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 711 1323 751">6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td data-bbox="1323 711 1453 751">10%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="663 778 1599 852">Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing-masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4.</p> <p data-bbox="663 879 824 903">Unit Pelaksana:</p> <p data-bbox="663 930 1357 954">Politeknik Negeri dan AKN dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.</p> <p data-bbox="663 981 757 1005">Formula:</p> $Target\ IKU = (60\% \times komponen\ pengungkit) + (40\% \times komponen\ hasil)$ <p data-bbox="663 1083 1615 1157">Komponen Pengungkit terdiri atas : Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform. Komponen Hasil terdiri atas : Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.</p> <p data-bbox="663 1184 824 1208">Satuan : Persen</p> <p data-bbox="663 1235 1003 1259">Tipe Perhitungan : Nonkumulatif</p> <p data-bbox="663 1286 976 1310">Sumber Data : Aplikasi SiAzik</p>	Penilaian	Bobot	1. Manajemen Perubahan	8%	2. Penataan Tata Laksana	7%	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5. Penguatan Pengawasan	15%	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%			
Penilaian	Bobot																		
1. Manajemen Perubahan	8%																		
2. Penataan Tata Laksana	7%																		
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																		
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																		
5. Penguatan Pengawasan	15%																		
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																		

